



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

**KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 - 2025**

(PERUBAHAN KE-II)

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai landasan, arah dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, dan sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar, Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menyajikan isu-isu strategis meliputi permasalahan daerah dan isu strategis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini membahas tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Ciamis serta maknanya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun selama 20 (duapuluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB VII PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2005-2025.

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (NOMOR 117/2014)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum,

AEP SUNENDAR, S.H., M.H.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Hal yang mendasari perubahan tersebut adalah bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 baik substansi maupun sistematikanya belum mengikuti tatacara berdasarkan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu terjadi perubahan yang mendasar, mencakup perubahan kebijakan nasional yang ditunjukkan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan perubahan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Selanjutnya pada Tahun 2012 dibentuk Kabupaten Pangandaran hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini akan berdampak terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan termasuk kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar termasuk perubahan geografis. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 perlu diubah kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dapat diselesaikan. RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang merupakan esensi dari perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis sebagai perwujudan hakikat kehendak masyarakat Kabupaten Ciamis, khususnya 10 tahun yang akan datang dan menjadi sumber fundamental dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis ini diharapkan dapat memperjelas arah dan tujuan pembangunan yang berkesinambungan, sistematis dan menyeluruh yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pasca pemekaran wilayah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Dalam upaya memenuhi harapan tersebut, maka RPJPD ini harus dijadikan acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan yang ada di bawahnya dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Mudah-mudahan dengan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 ini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dimaksud meliputi struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi Pemerintah dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, sehingga mampu mewujudkan visi Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu ; "Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025".

BUPATI CIAMIS

H. IING SYAM ARIFIN



DAFTAR ISI

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis	iii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xix
Daftar Grafik	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
1.5 Maksud dan Tujuan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	9
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	11
a. Hutan Produksi	11
b. Hutan Rakyat	11
c. Pertanian	11
d. Perikanan	12
e. Pertambangan	12
f. Industri	12
g. Pariwisata	13
h. Permukiman	13
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	15
a. Bencana Gempabumi	15
b. Gerakan Tanah	16
c. Banjir	17
2.1.4 Demografi	17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	20
a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	21
b. PDRB Per Kapita	23
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi	23
d. Tingkat Inflasi	25
e. Gini Ratio	25

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	26
a. Pendidikan	29
b. Kesehatan	30
c. Kemiskinan	31
d. Ketenagakerjaan	31
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	32
2.3 Aspek Pelayanan Publik	33
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	33
a. Pendidikan	33
b. Kesehatan	34
c. Pekerjaan Umum	35
d. Perumahan	36
e. Penataan Ruang	36
f. Perencanaan Pembangunan	37
g. Perhubungan	38
h. Lingkungan Hidup	38
i. Pertanahan	39
j. Kependudukan dan Catatan Sipil	39
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	40
m. Sosial	41
n. Ketenagakerjaan	41
o. Koperasi dan UMKM	42
p. Penanaman Modal	42
q. Kebudayaan	43
r. Kepemudaan dan Olah Raga	43
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	43
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	44
u. Ketahanan Pangan	45
v. Pemberdayaan Masyarakat Desa	45
w. Statistik	45
x. Kearsipan	46
y. Komunikasi dan Informatika	46
z. Perpustakaan	46
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	46
a. Pertanian	47
b. Kehutanan	48
c. Energi dan Sumber Daya Mineral	49
d. Pariwisata	49
e. Kelautan dan Perikanan	50

f. Perdagangan	50
g. Perindustrian	51
h. Ketransmigrasian	51
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	52
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	52
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	53
a. Sarana Pertanian	53
b. Jaringan Listrik	53
c. Penataan Wilayah	53
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	54
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	54
BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS	57
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	57
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Urusan Wajib	57
a. Pendidikan	57
b. Kesehatan	58
c. Pekerjaan Umum	58
d. Perumahan	59
e. Penataan Ruang	59
f. Perencanaan Pembangunan	60
g. Perhubungan	60
h. Lingkungan Hidup	60
i. Pertanahan	60
j. Kependudukan dan Catatan Sipil	61
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	61
m. Sosial	61
n. Ketenagakerjaan	62
o. Koperasi dan UMKM	62
p. Penanaman Modal	62
q. Kebudayaan	62
r. Kepemudaan dan Olah Raga	63
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	63
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	63
u. Ketahanan Pangan	64
v. Pemberdayaan Masyarakat Desa	64
w. Statistik	64
x. Kearsipan	65
y. Komunikasi dan Informatika	65
z. Perpustakaan	65

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Urusan Pilihan Pemerintah	65
a. Bidang Pertanian	65
b. Bidang Kehutanan	66
c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	66
d. Bidang Pariwisata	66
e. Bidang Kelautan dan Perikanan	67
f. Bidang Perdagangan	67
g. Bidang Perindustrian	67
h. Bidang Transmigrasi	68
3.2 Isu Strategis	68
3.2.1 Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat	68
3.2.2 Penelaahan RPJP Daerah Lain	69
3.2.3 Isu-isu Strategis Kabupaten Ciamis	70
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	71
4.1 Visi	71
4.2 Misi	72
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	75
5.1 Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah	75
5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang	81
5.2.1 RPJMD Kesatu (2005-2009)	82
5.2.2 RPJMD Kedua (2010-2014)	88
5.2.3 RPJMD Ketiga (2014-2019)	94
5.2.4 RPJMD Keempat (2019-2024)	100
BAB VI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	107
BAB VII PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daerah Rawan Gempabumi di Kabupaten Ciamis	16
Tabel 2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Per Kecamatan Tahun 2009-2013	18
Tabel 2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 (orang)	19
Tabel 2.4	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	21
Tabel 2.5	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	22
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	24
Tabel 2.7	Perbandingan LPE Kabupaten Ciamis dengan daerah sekitar dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2012	25
Tabel 2.8	Perbandingan IPM Kabupaten Ciamis dengan daerah sekitar dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2012	26
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	27
Tabel 2.10	Angka Melek Huruf di Kabupaten Ciamis Tahun 2008-2013	28
Tabel 2.11	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka <i>Drop Out</i> (DO) di Kabupaten Ciamis Tahun 2009 - 2013	29
Tabel 2.12	Capaian Aspek Kesehatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	30
Tabel 2.13	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	31
Tabel 2.14	Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kesempatan Kerja dan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	31
Tabel 2.15	Kelompok Kesenian, Kebudayaan dan Situs di Kabupaten Ciamis Tahun 2009 – 2013	32
Tabel 2.16	Jumlah Organisasi Olahraga dan Gedung Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2013	32
Tabel 2.17	Data Kinerja Layanan Pendidikan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	33
Tabel 2.18	Data kinerja layanan kesehatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2012	34
Tabel 2.19	Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	35
Tabel 2.20	Data Kinerja Layanan Perumahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	36
Tabel 2.21	Data Kinerja Layanan Penataan Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	37
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2009-2013	39
Tabel 2.23	Data kinerja keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	40
Tabel 2.24	Capaian Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	41
Tabel 2.25	Data kinerja Kebudayaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	43
Tabel 2.26	Data kinerja bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	44
Tabel 2.27	Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	47
Tabel 2.28	Data kinerja Kehutanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	49
Tabel 2.29	Data kinerja Pariwisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	50

Tabel 2.30 Data Kinerja Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	50
Tabel 2.31 Data Kinerja Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	51
Tabel 2.32 Data Kinerja Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	51
Tabel 2.33 Angka Konsumsi Rumah Tangga perkapita Tahun 2009 s.d 2013 di Kabupaten Ciamis	52
Tabel 2.34 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Ciamis Tahun 2010 - 2013	52
Tabel 2.35 Jumlah Restoran dan Hotel di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013	53
Tabel 2.36 Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2011	54
Tabel 2.37 Rasio Ketergantungan Tahun 2009-2013 di Kabupaten Ciamis	54
Tabel 2.38 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2009 - 2013 Kabupaten Ciamis	55
Tabel 3.1 Identifikasi Isu Strategis	68
Tabel 3.2 Identifikasi RPJP Daerah Lain (Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya)	69
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi RPJP Nasional, Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis	72
Tabel 4.2 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ciamis	72
Tabel 4.3 Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Barat	73
Matrik 5.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025	75
Matrik 5.2 Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis 2005-2025	78
Matrik 5.3 Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Kebijakan Prioritas Periode Tahun 2014-2019	94
Matrik 5.4 Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Kebijakan Prioritas Periode Tahun 2019-2024	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005 -2025	2
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Ciamis (Sebelum dan Sesudah Pembentukan Kabupaten Pangandaran)	9
Gambar 2.2	Peta Rawan Gempabumi di Kabupaten Ciamis	15
Gambar 2.3	Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Ciamis	16
Gambar 2.4	Peta Rawan Banjir di Kabupaten Ciamis	17

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 (%)	20
Grafik 2.2	PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	20
Grafik 2.3	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	23
Grafik 2.4	Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013	24
Grafik 2.5	Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013	25
Grafik 2.6	Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	27
Grafik 2.7	Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	28
Grafik 2.8	Perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	28
Grafik 2.9	Perkembangan Paritas Daya Beli di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	29





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

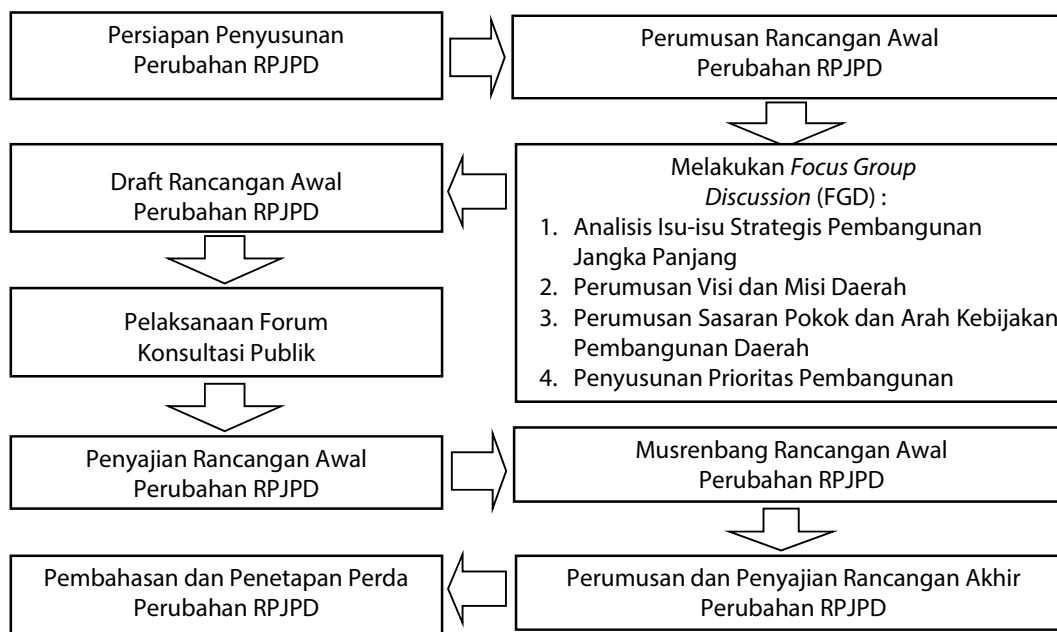
Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen rencana untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang disingkat RPJPD, memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. RPJPD merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan yang ada di bawahnya dan sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012. Sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Ciamis, melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, maka RPJPD Kabupaten Ciamis perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang yang lebih konkrit pasca berpisahnya 10 (sepuluh) kecamatan dari wilayah Kabupaten Ciamis.

Penyusunan perubahan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan dan perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya : dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki serta disesuaikan dengan dinamika perkembangan regional dan nasional.

Penyusunan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis mengacu kepada RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan dilakukan melalui upaya pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Tahapan penyusunan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dimulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir sampai tahap penetapan Perda, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis
Tahun 2005 -2025



Kebijakan pembangunan Jangka Panjang Nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan yang tercantum dalam RPJPN adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010. Visi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat adalah “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia” dengan misi :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis disusun dalam upaya memperjelas arah dan tujuan pembangunan yang berkesinambungan, sistematis dan menyeluruh yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi empiris menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pasca pemekaran wilayah, sehingga

untuk pemecahannya memerlukan perencanaan strategis yang berdimensi jangka panjang dalam bentuk RPJPD.

Identifikasi dan proyeksi kondisi, masalah, peluang dan tantangan pembangunan daerah merupakan tahap awal penyusunan perubahan RPJPD. Langkah ini merupakan bentuk pemindaian (scanning) lingkungan, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kondisi berbagai aspek pembangunan termasuk didalamnya kajian lingkungan hidup strategis. Hasil dari langkah ini merupakan dasar dalam merancang visi dan misi serta sasaran dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting yang ditempuh dalam upaya mengeksplorasi, membangun dan menyempurnakan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini. Oleh karena itu, dalam kegiatan konsultasi publik dilakukan urun rembuk untuk memperoleh informasi dan pandangan serta aspirasi masyarakat yang kemudian disintesis dengan pendekatan teknokratis-akademis dan selanjutnya dikukuhkan melalui proses politis menjadi suatu kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dari proses tersebut, terwujudlah suatu rumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang sistematis, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang merupakan esensi dari perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis sebagai perwujudan hakikat kehendak masyarakat Kabupaten Ciamis, khususnya 10 tahun yang akan datang dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada. Visi dan Misi ini menjadi sumber fundamental dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Arah pembangunan jangka panjang berisikan gambaran mengenai langkah-langkah pembangunan umum bersifat arahan (indikatif) yang harus dilakukan khususnya selama 10 tahun ke depan. Rumusan kebijakan pembangunan yang bersifat lebih operasional (imperatif) dalam kurun waktu yang lebih pendek, yaitu lima tahunan (jangka menengah) dan satu tahunan (jangka pendek) harus mengacu secara konsisten terhadap arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Atas dasar hal tersebut, pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai upaya untuk melakukan perubahan mendasar. Perubahan itu meliputi struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi Pemerintah dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Keberadaan RPJPD sangat penting dan strategis untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan arah dan sasaran pokok pembangunan daerah, sekaligus sulit untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kabupaten Ciamis menyusun perubahan RPJPD, khususnya untuk kurun waktu 10 tahun kedepan, yaitu untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025. Perubahan RPJPD ini selanjutnya dibagi ke dalam empat periode tahapan pembangunan. Tahun 2005-2009 dan Tahun 2009-2014 sebagai periode yang telah dilaksanakan dan Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024, sebagai periode yang akan dilaksanakan untuk pendukung tujuan pembangunan regional Jawa Barat dan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
 32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 24);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

1.3. Hubungan Antar Dokumen.

Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna menyelaraskan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ciamis dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Ciamis 2011-2031. Selain itu penyusunan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis juga memperhatikan pemanfaatan struktur dan pola ruang RTRW Kabupaten/kota lainnya yaitu : Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah tetangga/perbatasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan untuk jangka waktu khususnya 10 tahun ke depan. Adapun sistematika penulisan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perubahan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menyajikan permasalahan daerah dan isu strategis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan Kabupaten Ciamis beserta maknanya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah setiap misi. Selanjutnya menjelaskan prioritas masing-masing tahapan rumusan dan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan selama khususnya 10 (sepuluh) tahun kedepan.

BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen perubahan RPJPD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan khususnya selama Tahun 2015-2024.

1.5. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis adalah:

1. Menetapkan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.
3. Mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta *Millenium Development Goals* (MDGs).

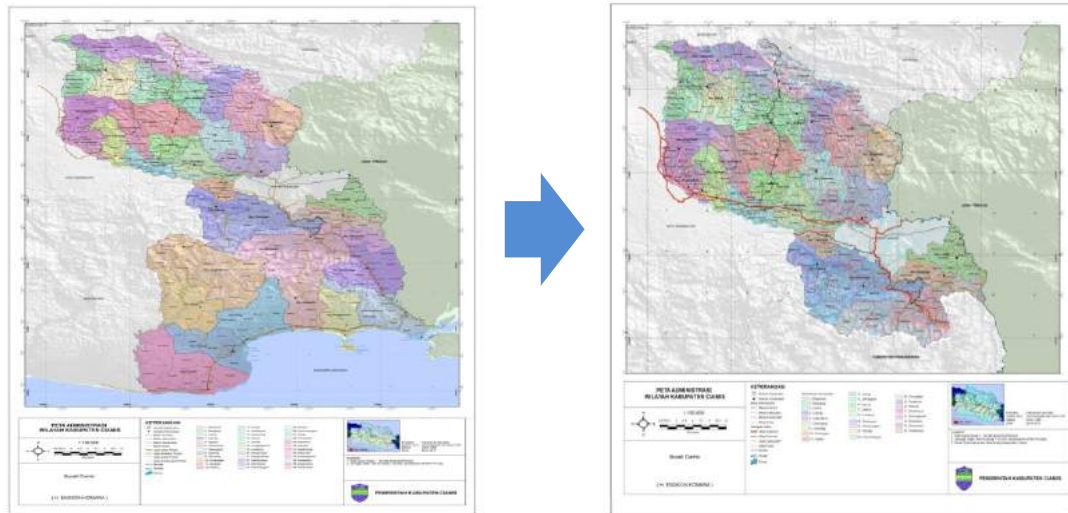
BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis mengalami dua kali pemekaran wilayah, *pertama* dengan dibentuknya Kotif Banjar yang telah dikukuhkan menjadi Kota pada Tahun 2002 dan *kedua* dengan dibentuknya Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran meliputi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu : Cimerak, Cigugur, Langkaplancar, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang dan Mangunjaya, sedangkan cakupan wilayah Kabupaten Ciamis menjadi 26 (dua puluh enam) kecamatan di luar 10 kecamatan tersebut.

Wilayah Kabupaten Ciamis sebelum dan sesudah pembentukan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Ciamis
(Sebelum dan Sesudah Pembentukan Kabupaten Pangandaran)



Berkurangnya 10 wilayah kecamatan di Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Pangandaran berdampak terhadap perubahan data berbagai aspek. Data Tahun 2009 s/d 2012 yang disajikan dalam bab ini masih merupakan data kondisi 36 kecamatan, sedangkan untuk 26 kecamatan tercantum dalam data Tahun 2013.

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Ciamis setelah pembentukan Kabupaten Pangandaran memiliki luas 1.433,10 Km², yang sebelumnya seluas 2.444,79 Km². Wilayah administrasi Kabupaten Ciamis setelah pembentukan Kabupaten Pangandaran terdiri dari 26 kecamatan, 258 desa dan 7 kelurahan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki keadaan morfologi dari datar-bergelombang sampai pegunungan, dengan jenis tanahnya didominasi oleh jenis latosol, podsolik, alluvial dan grumusol. Berada pada ketinggian antara 10 - 1.740 m dan memiliki kelerengan antara 0% - >40%. Kawasan dengan kemiringan lereng >40% perlu dijaga karena berpotensi menimbulkan bencana apabila tidak dikelola dengan baik. Geologi regional daerahnya disusun oleh beberapa macam formasi batuan yang berumur mulai dari Oligosen sampai Holosen.

Wilayah Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Cimuntur, Cijolang dan Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy. Wilayah Kabupaten Ciamis yang termasuk DAS Citanduy tersebut, terbagi kedalam Sub DAS Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha, Sub DAS Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub DAS Cimuntur seluas 55.163,06 Ha dan Sub DAS Cijolang seluas 18.665,99 Ha. DAS Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai DAS kritis dengan indikator kekritisannya antara lain fluktuasi debit sungai, tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi (± 5 juta ton/tahun terbawa oleh sungai Citanduy), serta produktivitas DAS yang relatif rendah.

Gambaran kondisi klimatologi Kabupaten Ciamis terlihat dari jumlah curah hujan setiap bulan dan jumlah hari hujan dalam setiap tahunnya. Menurut hasil pendataan rata-rata curah hujan Tahun 2012 adalah sebesar 2.630,8 mm sedangkan hari hujan 139,6 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut *Schmidt-Ferguson*, Kabupaten Ciamis pada umumnya mempunyai tipe iklim C, dengan suhu rata-rata antara 20^o - 30^o C.

Penggunaan lahan di Kabupaten Ciamis terbagi atas lahan kering dan lahan sawah. Penggunaan lahan kering terbesar adalah berupa tegal, kebun, ladang dan huma, sedangkan penggunaan lahan sawah terbesar adalah sawah irigasi teknis dan irigasi desa. Selain kawasan budidaya terdapat pula kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Ciamis diantaranya adalah kawasan resapan air seluas kurang lebih 9.182 Ha, meliputi Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti, Panjalu, Lumbung, Kawali, Cipaku, Sadananya, Sindangkasih, Sukamantri dan Panumbangan. Sempadan sungai yang terdapat hampir di seluruh kecamatan dengan sungai utama yaitu Sungai Citanduy, kawasan sekitar danau dan embung kawasan ruang terbuka hijau Cagar alam terdapat di Panjalu seluas 16 Ha. Suaka Margasatwa terdapat di Gunung Sawal meliputi areal seluas 5.400 Ha. Cagar Budaya terdapat di Astana Gede Kawali seluas 5,5 Ha, Karangkamulyan - Cijeungjing seluas 24 Ha dan Kampung Kuta - Tambaksari seluas 17 Ha. Selain itu, Cagar Budaya juga terdapat di Kecamatan Ciamis berupa kawasan tempat disemayamkannya para Bupati Galuh pada masa lalu.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam konteks pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis termasuk dalam wilayah pengembangan Priangan Timur-Pangandaran untuk mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKNp Pangandaran serta pengembangan secara terbatas kawasan daerah bagian selatan.

Potensi pengembangan wilayah dari sisi rencana pola ruang diantaranya adalah ditetapkannya total luas kawasan lindung dengan peruntukan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (sungai, kawasan sekitar danau dan embung, ruang terbuka hijau), kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi (kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan kars dan kawasan sekitar mata air), dan kawasan lindung lainnya (kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dan kawasan sesuai hutan lindung). Sedangkan kawasan budidaya berupa ; hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman serta peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan.

a. Hutan produksi

Hutan produksi di Kabupaten Ciamis terdiri dari hutan produksi terbatas di Kecamatan Cidolog, Panumbangan, Sadananya, Cihaurbeuti, Sukamantri, Panawangan, Pamarican; dan hutan produksi tetap di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Pamarican, Cisaga, Rancah, Tambaksari, Sadananya, Cipaku, Cikoneng, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, Sukamantri dan Rancah.

b. Hutan rakyat

Hutan rakyat di Kabupaten Ciamis tersebar di 26 kecamatan yang telah dikembangkan sejak lama baik melalui swadaya masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah melalui program penghijauan.

c. Pertanian

Kegiatan pertanian menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis, sehingga pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa pemerintah daerah "*concern*" terhadap pengembangan potensi sektor pertanian.

Tanaman pangan diusahakan melalui pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian sawah meliputi 35.477,62 Ha, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Sawah yang relatif luas terdapat di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Pamarican dan Purwadadi. Sistem pengairan yang digunakan meliputi irigasi teknis (10.388 ha), irigasi ½ teknik (2.638 ha), irigasi PU (3.775 ha), irigasi non PU (10.728 ha), tadah hujan (7.942 ha) dan lebak (5 ha).

Perkebunan di Kabupaten Ciamis, meliputi Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat. Produksi perkebunan di Kabupaten Ciamis didominasi oleh komoditas kelapa, kakao dan karet yang menjadi komoditas andalan perkebunan dengan pangsa pasar ekspor.

Peternakan di Kabupaten Ciamis terdiri dari ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (domba dan kambing), dan ternak unggas (ayam dan itik). Potensi peternakan di Kabupaten Ciamis secara keseluruhan sebagai berikut :

- Ternak besar sapi potong terdapat di seluruh kecamatan.
- Ternak besar (sapi perah) di Kecamatan Cikoneng, Panjalu, Cihaurbeuti, Cipaku, Sindangkasih, Panumbangan, Sukamantri dan Panawangan.
- Ternak besar (kerbau) di seluruh kecamatan.
- Ternak besar (kuda) di Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Banjarsari dan Laktbok.
- Ternak kecil (domba dan kambing) di seluruh kecamatan.
- Ternak unggas (ayam dan itik) di seluruh kecamatan.

d. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan. Perikanan tangkap, terdiri dari : 1) Perairan umum rawa di Kecamatan Banjarsari, Laktbok, Tambaksari, Rancah, Purwadadi, 2) Perairan umum danau/situ/cekdam di Kecamatan Banjarsari, Pamarican, Cisaga, Tambaksari, Rajadesa, Sadananya, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Lumbung dan Sukamantri, 3) Pemanfaatan danau atau situ atau cekdam dan perairan umum sungai tersebar di seluruh kecamatan. Budidaya perikanan terdiri dari : 1) Budidaya air tawar kolam air deras di Kecamatan Ciamis, Cihaurbeuti, Sadananya, Kawali, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Lumbung, 2) Budidaya air tawar mina padi di seluruh kecamatan kecuali Laktbok, Cidolog, Sukamantri, dan 3) Budidaya air tawar kolam air tenang, tersebar di seluruh kecamatan. Industri pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Banjarsari, Laktbok, Cimaragas, Cisaga, Tambaksari, Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Cipaku, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Purwadadi.

Prasarana perikanan yang tersedia berupa Balai Benih Udang Galah (BBUG) Kecamatan Pamarican, BBI Sukamaju Kecamatan Baregbeg, Pasar Ikan Banagara Kecamatan Ciamis, Pasar Ikan Kecamatan Cihaurbeuti, Pasar Ikan Kecamatan Panumbangan dan Pasar Ikan Cileungsir Kecamatan Rancah.

e. Pertambangan

- 1) Kawasan peruntukan mineral (batu gamping, fosfat, zeolit, tras, feldspar, kaolin, lempung, emas, kalsit, mangan, pasir, andesit, bentonit, barit, belerang, marmer, tembaga, timbal, mineral logam besi, batubara, dolomit, okar merah, batu apung, jasper dan kayu terkersikan) tersebar di beberapa kecamatan.
- 2) Kawasan peruntukan panas bumi berupa energi panas bumi terdapat di Gunung Sawal Kecamatan Cihaurbeuti.

f. Industri

- 1) Peruntukan industri besar diarahkan di Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Baregbeg, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Banjarsari, Padaherang, Laktbok, Mangunjaya, Pamarican, Cimaragas, Cidolog, Purwadadi, Pangandaran, Kalipucang, Sidamulih, Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur dan Langkaplancar.
- 2) Peruntukan industri menengah kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.

g. Pariwisata

Setelah pembentukan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2012, maka obyek wisata di Kabupaten Ciamis menjadi berkurang. Sebelumnya Kabupaten Ciamis memiliki 21 Obyek Wisata, terdiri dari 6 Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, 5 Obyek Wisata dikelola oleh Perum Perhutani dan 10 Obyek Wisata dikelola oleh Pemerintah Desa setempat. Saat ini potensi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata, di Kabupaten Ciamis dibagi kedalam dua kategori :

- 1) Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya sebanyak 6 objek wisata, yaitu Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu, Astana Gede di Kecamatan Kawali, Kampung Kuta di Kecamatan Tambaksari, Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing, Museum Fossil di Kecamatan Tambaksari dan situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing, Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican, Cipanjalu, Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kecamatan Panjalu.
- 2) Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus sebanyak 5 objek wisata yaitu Curug Tujuh di Kecamatan Panjalu, Curug Tilu di Kecamatan Cihaurbeuti, Wisata Tapos di Kecamatan Sadananya, Batucakra Penangkaran Rusa di Kecamatan Cikoneng, Air Panas Cikupa di Kecamatan Banjarsari.
- 3) Obyek wisata alam, di Situ Cibubuhan Kecamatan Sukamantri.
- 4) Obyek wisata buatan, seperti kolam renang Tirta Winaya di Kecamatan Ciamis dan Waterboom Icahan di Kecamatan Cipaku.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, maka diagendakan berbagai event kepariwisataan seperti Nyuguh, Hajat Bumi Selamintuna, Hajat Bumi Nyangku, Upacara Adat Nyacar Jalan Tambaksari, Gelar Budaya Tatar Galuh, Pentas Wayang Golek, Kreatifitas Seni, Upacara Adat Nyipuh, Misalin, Upacara Adat Ngikis, Upacara Adat Merlawu, Pentas Seni Hiburan Hari Raya, Gong Perdamaian Dunia dan Kontes Burung Berkicau. Selain itu juga terdapat beberapa jenis hiburan yang tersedia dari berbagai perkumpulan atau organisasi kesenian terdiri grup seni budaya dan sastra, grup seni musik tradisional dan modern, serta 4 buah museum dan bangunan sejarah yaitu Museum Galuh Imbanagara - Ciamis, Museum Fossil Tambaksari, Bumi Alit Panjalu, dan Museum Galuh Pakuan/Jambansari - Ciamis.

h. Permukiman

Peruntukan permukiman terdiri dari perkotaan dan perdesaan.

- 1) Peruntukan Permukiman Perkotaan terdiri dari:
 - Perkotaan Ciamis, di Kelurahan Ciamis, Maleber, Kertasari, Cigembor, Benteng, Linggasari, Sindangrasa, Desa Pawindan, Panyingkiran, dan Imbanagara.
 - Perkotaan Banjarsari, di Desa Banjarsari, Sukasari, Cibadak, Sindangsari, Purwasari, Sindanghayu dan Cikaso.
 - Perkotaan Kawali, di Desa Kawali, Kawalimukti, Linggapura, Winduraja dan Karangpawitan.
 - Perkotaan Panumbangan, di Desa Panumbangan, Tanjungmulya, Sukakerta, Golat dan Sindangherang.
 - Perkotaan Cikoneng, di Desa Cikoneng, Margaluyu, Gegempalan, Sindangsari dan Cimari.

- Perkotaan Cijeungjing, di Desa Cijeungjing, Pamalayan, Ciharalang, Bojongmengger, Karangkamulyan, Handap-herang, Dewasari dan Utama.
 - Perkotaan Lumbung, di Desa Lumbung dan Awiluar.
 - Perkotaan Jatinagara, di Desa Jatinagara, Sukanagara dan Dayeuhluhur.
 - Perkotaan Rajadesa, di Desa Rajadesa, Sirnabaya dan Sirnajaya.
 - Perkotaan Rancah, di Desa Rancah dan Cileungsir.
 - Perkotaan Lakbok, di Desa Sukanagara.
 - Perkotaan Pamarican, di Desa Pamarican, dan Neglasari
 - Perkotaan Cidolog, di Desa Cidolog dan Janggala.
 - Perkotaan Cimaragas, di Desa Cimaragas dan Beber.
 - Perkotaan Cisaga, di Desa Cisaga dan Mekarmukti.
 - Perkotaan Tambaksari, di Desa Tambaksari dan Kaso.
 - Perkotaan Sukadana, di Desa Sukadana dan Margaharja.
 - Perkotaan Cihaurbeuti, di Desa Cihaurbeuti, Pamokolan, Padamulya, Pasirtamiang, Sumberjaya dan Sukasetia.
 - Perkotaan Sadananya, di Desa Sadananya, Bendasari, Sukajadi dan Mekarjadi.
 - Perkotaan Cipaku, di Desa Selacai, Buniseuri dan Selamanik.
 - Perkotaan Panawangan, di Desa Panawangan, Cinyasag dan Gardujaya.
 - Perkotaan Sindangkasih, di Desa Sindangkasih, Sukamanah, Sukaraja, Sukasenang, Wanasigra, Budiharja dan Gunungcupu.
 - Perkotaan Baregbeg, di Desa Baregbeg dan Sukamaju.
 - Perkotaan Purwadadi, di Desa Sukamaju.
 - Perkotaan Sukamantri, di Desa Sukamantri dan Cibeureum.
- 2) Permukiman perdesaan diarahkan di desa-desa yang tidak termasuk ke dalam kawasan ibukota kecamatan. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman di perdesaan di arahkan pada desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di kawasan rawan bencana serta di desa perbatasan. Penataan kawasan permukiman perdesaan dilakukan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana. Sumber energi bagi perdesaan diarahkan pada pengembangan Desa Mandiri Energi terutama untuk perdesaan yang tidak memiliki sumber energi, hal ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di wilayah perdesaan direncanakan untuk dapat membangun sarana olah raga dan pusat / gugus kegiatan belajar.

Potensi pengembangan wilayah berupa Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi :

- a. KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga, yaitu penanganan untuk mengendalikan perkembangan.
- b. KSK Situ Panjalu, yaitu penanganan untuk pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung sebagai obyek wisata.
- c. KSK Agropolitan di Kecamatan Sukamantri, Panumbangan, Panjalu, Lumbung dan Cihaurbeuti, yaitu penanganan untuk penyediaan sarana prasarana kawasan agropolitan dan program-program kawasan agropolitan.

- d. KSK Kawasan Perkotaan Kawali, yaitu penanganan untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu memberikan pelayanan dan mendorong pertumbuhan bagi kawasan Utara Ciamis.
- e. KSK Kawasan Perkotaan Banjarsari, yaitu penanganan untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal dan memberikan pelayanan secara efektif sebagai pusat pertumbuhan di kabupaten.
- f. KSK Lumbung Padi, yaitu penanganan KSK Lumbung Padi, yaitu peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
- g. KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara dan Koridor Barat, yaitu penanganan untuk penyesuaian infrastruktur pada kawasan perbatasan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari perbukitan dan daratan yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi. Menurut buku Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2011, secara Nasional Kabupaten Ciamis masuk dalam peringkat urutan Nomor 22 Kabupaten/Kota rawan bencana tinggi dari total 494 Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sedangkan di tingkat level Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis masuk dalam peringkat Nomor 8 kategori rawan bencana tinggi dari total 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat (Indeks Rawan Bencana Indonesia - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2011).

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, Kabupaten Ciamis rawan akan bencana gempabumi, gerakan tanah dan banjir. Setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran, maka ancaman bencana tsunami dan abrasi sudah tidak menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis, karena Kabupaten Ciamis sudah tidak mempunyai wilayah laut.

a. Bencana Gempabumi

Wilayah Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah bagian Selatan yang dilalui oleh 2 (dua) lempengan pertemuan antara Indo Australia dengan Eurasia yang pada suatu waktu dapat terjadi gempa bumi (BMKG Stasiun Geofisika Klas I Bandung, 2011).

Dari catatan sejarah dan fakta geomorfologi tentang letak Kabupaten Ciamis yang dilalui gerakan jalur sesar aktif atau zona gempa bumi, maka selanjutnya perlu sekali diketahui kaidah Skala Intensitas atau kekuatan gelombang gempa bumi

Gambar 2.2
Peta Rawan Gempabumi di
Kabupaten Ciamis



yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan peta Zona Rawan Gempa Bumi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Tahun 2003, Kabupaten Ciamis terbagi atas 2 zona yaitu, zona MMI IV-V dan MMI V-VI. Adapun sebaran daerah yang rawan akan bencana gempa bumi di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Daerah Rawan Gempabumi di Kabupaten Ciamis

MMI	DAERAH RAWAN GEMPABUMI
IV-V	Sukamantri, Panumbangan, Panawangan, Panjalu, Lumbang, Kawali, Rajadesa, Jatinagara, Rancah, Tambaksari, Cipaku, Cihaurbeuti, sebagian besar Sadananya, sebagian besar Cikoneng, sebagian besar Sindangkasih, sebagian Baregbeg, sebagian besar Sukadana, sebagian Cipaku
V-VI	Sebagian Sindangkasih, sebagian Cikoneng, sebagian Sadananya, sebagian Baregbeg, sebagian Sukadana, sebagian besar Cisaga, Cijeungjing, Ciamis Cimaragas, Cidolog, Pamarican, Purwadadi, Lakbok, Banjarsari

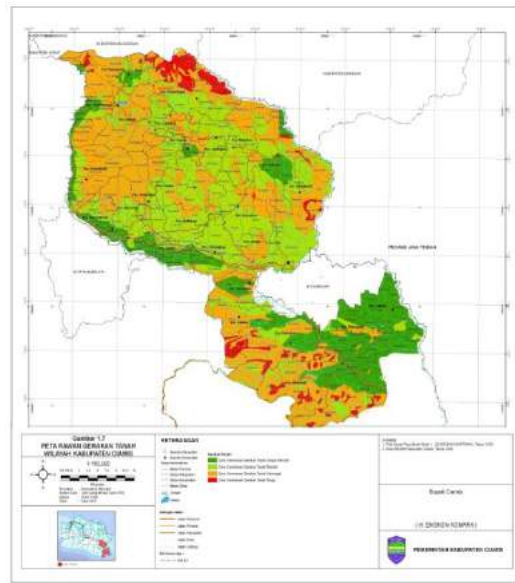
Sumber: *Peta Rawan Gempabumi di Kabupaten Ciamis (RTRW Kabupaten Ciamis 2011-2031) Diolah*

b. Gerakan Tanah

Jenis gerakan tanah yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis adalah longsoran tanah dan material dengan tingkat waktu kejadian antara sangat lambat hingga cepat, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap waktu kejadian longsoran adalah curah hujan yang tinggi yang menjenuhi tanah penutup yang sangat tebal. Oleh karena itu longsoran sering terjadi pada musim hujan. Longsoran sering terjadi pada daerah dengan morfologi terjal, litologi batuan relatif lunak (batu pasir, batu lempung atau tufa) dan tanah penutup (soil) yang cukup tebal serta tingkat curah hujan yang relatif tinggi. Potensi bencana gerakan tanah terdapat di semua kecamatan. Sehingga seluruh kecamatan harus diwaspadai, dalam arti untuk pengembangan permukiman harus sangat hati-hati dalam menentukan lokasinya. Lahan permukiman harus berada pada tingkat kelerengan yang relatif kecil.

Sesuai dengan Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Ciamis terbagi atas 4 zona,

Gambar 2.3
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Ciamis



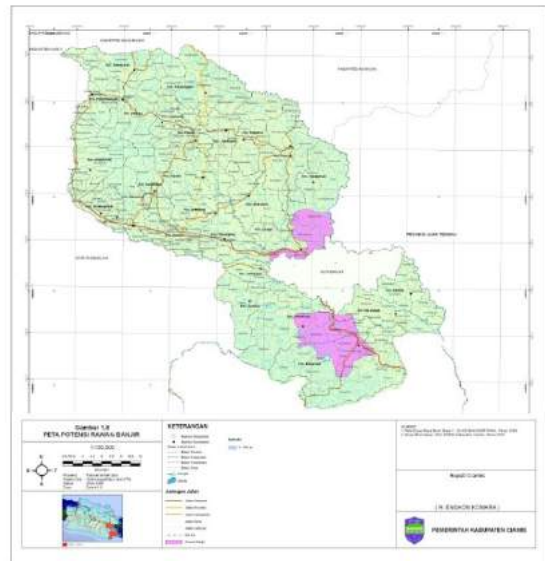
1. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah
2. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah
3. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah
4. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Adapun beberapa Kecamatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki area yang termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah tinggi adalah Panawangan, Sukamantri, Rancah, Tambaksari, Cidolog, Pamarican dan Banjarsari.

c. Banjir

Banjir di Kabupaten Ciamis dapat dikategorikan berkarakteristik genangan rata-rata tiap periode satu tahun dalam volume limpasan air yang sangat besar. Kerugian material dan infrastruktur relatif besar karena dampak yang ditimbulkan. Kawasan yang teridentifikasi sebagai daerah potensi banjir di Kabupaten Ciamis terdapat di Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari dan Purwadadi.

Gambar 2.4
Peta Rawan Banjir
di Kabupaten Ciamis



2.1.4. Demografi

Perkembangan Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- Tahun 2009 berjumlah 1.605.414 jiwa
- Tahun 2010 berjumlah 1.720.280 jiwa
- Tahun 2011 berjumlah 1.774.032 jiwa
- Tahun 2012 berjumlah 1.789.696 jiwa
- Tahun 2013 berjumlah 1.824.892 jiwa dan setelah pembentukan Kabupaten Pangandaran jumlahnya menjadi 1.372.846 jiwa.

Secara rinci, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Ciamis Per Kecamatan Tahun 2009-2013

No	Kecamatan	Tahun					Ket.
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Cimerak	45.159	47.363	49.995	50.126	51.264	Kab. Pangandaran (10 kec.)
2	Cijulang	25.256	27.524	28.666	28.459	28.968	
3	Cigugur	21.884	22.428	23.464	23.471	23.958	
4	Langkaplancar	44.460	49.999	52.515	52.493	53.378	
5	Parigi	31.514	44.875	46.932	46.441	47.493	
6	Sidamulih	24.983	28.927	29.930	30.284	30.926	
7	Pangandaran	47.282	55.725	57.467	58.616	59.988	
8	Kalipucang	39.415	40.581	41.156	41.960	43.004	
9	Padaherang	69.448	72.994	75.501	75.732	77.380	
10	Mangunjaya	32.338	33.641	34.958	34.925	35.687	
11	Banjasari	112.611	115.342	119.438	121.900	124.110	Kab. Ciamis (26 kec.)
12	Lakbok	48.916	59.397	60.961	61.603	62.650	
13	Pamarican	72.709	72.747	74.882	75.499	76.814	
14	Cidolog	19.959	20.465	21.059	20.903	21.396	
15	Cimaragas	16.890	16.914	17.104	17.276	17.594	
16	Cijeungjing	47.876	52.811	54.330	55.006	55.651	
17	Cisaga	38.885	39.509	40.219	40.390	40.840	
18	Tambaksari	21.249	23.464	24.040	23.793	24.342	
19	Rancah	59.455	60.497	61.808	61.874	62.766	
20	Rajadesa	47.209	56.010	58.265	58.415	59.892	
21	Sukadana	23.834	24.913	25.833	25.615	26.070	
22	Ciamis	97.168	98.952	101.133	102.215	104.557	
23	Cikoneng	52.498	55.325	57.035	57.672	59.024	
24	Cihaurbeuti	49.396	50.787	55.602	56.642	57.889	
25	Sadananya	34.666	37.456	38.993	39.370	40.597	
26	Cipaku	65.463	68.074	70.945	74.296	73.112	
27	Jatinagara	26.375	27.453	29.164	29.140	29.792	
28	Panawangan	52.167	55.421	56.859	58.125	59.346	
29	Kawali	41.867	42.699	44.131	44.557	45.374	
30	Panjalu	49.448	50.199	52.430	53.111	54.802	
31	Panumbangan	61.508	63.743	66.598	65.573	67.092	
32	Sindangkasih	48.781	50.338	54.312	54.440	55.765	
33	Baregbeg	41.507	43.719	44.356	44.474	45.415	
34	Lumbung	31.757	32.550	33.670	33.719	34.543	
35	Purwadadi	37.239	41.723	42.954	44.081	44.775	
36	Sukamantri	24.242	25.715	27.327	27.500	28.638	
	JUMLAH	1.605.414	1.720.280	1.774.032	1.789.696	1.824.892	
						452.046	Kab. Pangandaran
						1.372.846	Kab. Ciamis

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis pada Tahun 2009 sebanyak 1.605.414 jiwa sedangkan pada Tahun 2013 sebanyak 1.824.892 jiwa. Setelah pemekaran Kabupaten Pangandaran, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2013 adalah sebanyak 1.372.846 jiwa, terdiri dari 688.861 laki-laki dan 684.165 perempuan dengan sex ratio sebesar 100,66. Dengan luas wilayah Kabupaten Ciamis 1.433,10 km², maka kepadatan penduduk di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 adalah 958 orang per km². Kepadatan penduduk yang cukup tinggi (1.000-2.000 orang per km²) terdapat di Kecamatan Rajadesa, Purwadadi, Cipaku, Laktok, Panumbangan, Kawali, Lumbung, Cihaurbeuti, Cikoneng, Sindangkasih, sedangkan kepadatan yang tinggi (diatas 2.000 orang per km²) terdapat di Kecamatan Baregbeg dan Ciamis.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Ciamis tahun 2013 adalah sebesar 0,47%. Laju pertumbuhan penduduk bukan saja karena pertumbuhan alami tetapi juga dipengaruhi oleh adanya faktor migrasi, yaitu dari jumlah orang yang datang dan pergi. Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 seperti terlihat pada tabel berikut :

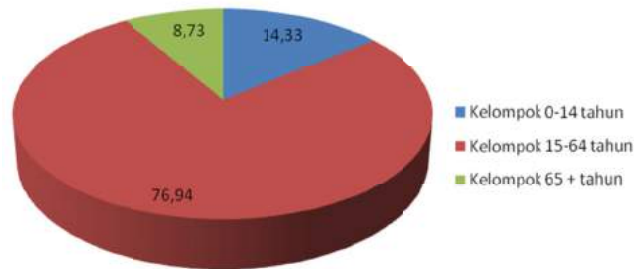
Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah
Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 (orang)

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Penduduk lahir	11.076	15.020	12.732	11.800	32.067
2	Penduduk mati	8.752	8.344	9.626	6.117	3.229
3	Penduduk datang	9.314	122.855	18.938	14.717	5.094
4	Penduduk pergi	8.563	14.429	15.575	11.116	7.219

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, 2014

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 76,94%, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 14,33% dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 8,73%. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka beban tanggungan (*Dependency Ratio*) mencapai 45, hal ini berarti pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 45 penduduk tidak produktif. Gambaran Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 dapat terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Ciamis Tahun 2013 (%)



Komposisi penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan agama yang dianut sampai dengan tahun 2013 adalah : Islam 1.370.205 orang (99,81%), Katholik 618 orang (0,05%), Protestan 1.601 orang (0,12%), Hindu 21 orang (0,0015%), Budha 107 orang (0,1%), Konghucu 137 orang (0,1%) dan aliran Kepercayaan 157 orang (0,1%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk Kabupaten Ciamis mempunyai tingkat pendidikan yang masih relatif rendah.

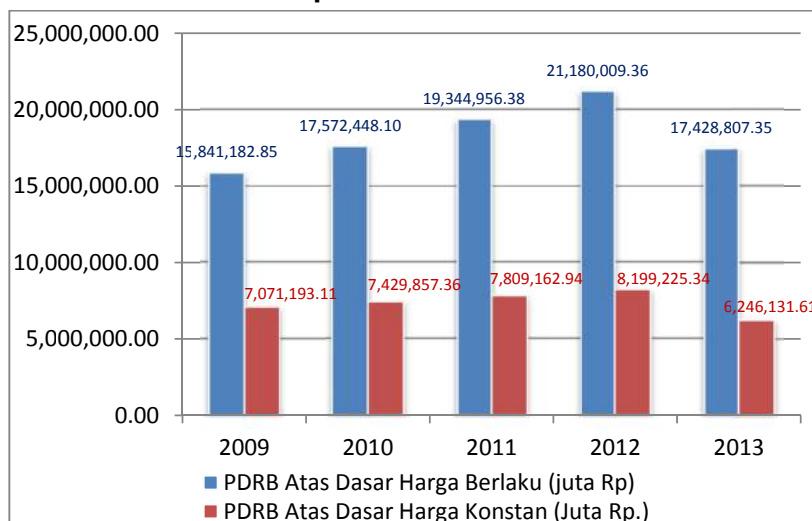
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu metoda yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita dan Tingkat Inflasi.

Gambaran kondisi PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 dapat terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.2
PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Tahun 2013, nilai PDRB Kabupaten Ciamis baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sebenarnya mengalami peningkatan akan tetapi dikarenakan pada Tahun 2013 wilayah kabupaten Ciamis berkurang 10 kecamatan, maka nilai PDRB Kabupaten Ciamis mengalami pengurangan. PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2013 mencapai 17,429 Triliyun dan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2013 sebesar 6,246 Triliyun.

Nilai dan kontribusi PDRB Kabupaten Ciamis atas dasar Harga berlaku Tahun 2009-2013 menurut lapangan usaha, dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun									
	2009		2010		2011		2012		2013***)	
Sektor Primer	4.884.127,08	30,83	5.418.433,21	30,83	5.848.923,07	30,24	6.167.949,73	29,12	4.759.621,429	27,31
1 Pertanian	4.831.886,55	30,50	5.362.673,22	30,52	5.789.464,97	29,93	6.104.565,21	28,82	4.728.360,584	27,13
2 Pertambangan dan Penggalian	52.240,53	0,33	55.759,99	0,32	59.458,11	0,31	63.384,52	0,3	31.260,845	0,18
Sektor Sekunder	1.685.679,54	10,64	1.840.601,10	10,47	2.028.224,09	10,49	2.265.968,03	10,7	1.978.800,450	11,35
3 Industri Pengolahan	1.063.768,20	6,72	1.179.497,24	6,71	1.311.238,76	6,78	1.481.504,93	6,99	1.344.897,022	7,72
4 Listrik, Gas dan Air Bersih	102.767,50	0,65	121.438,83	0,69	140.371,83	0,73	162.720,12	0,77	134.832,066	0,77
5 Bangunan	519.143,84	3,28	539.665,03	3,07	576.613,50	2,98	621.742,98	2,94	499.071,362	2,86
Sektor Tersier	9.271.376,23	58,53	10.313.413,78	58,69	11.467.809,22	59,27	12.746.091,60	60,18	10.690.385,475	61,34
6 Perdagangan Hotel dan Restoran	4.144.699,25	26,16	4.670.330,86	26,58	5.186.933,06	26,81	5.786.263,83	27,32	4.431.940,93	25,43
7 Pengangkutan dan Komunikasi	1.593.165,06	10,06	1.711.752,67	9,74	1.853.494,04	9,58	1.974.171,99	9,32	2.086.490,127	11,97
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	870.004,82	5,49	969.186,01	5,52	1.090.072,08	5,63	1.222.608,51	5,77	1.068.150,844	6,13
9 Jasa-jasa	2.663.507,10	16,81	2.962.144,24	16,86	3.337.310,04	17,25	3.763.047,27	17,77	3.103.803,574	17,81
PDRB	15.841.182,85	100	17.572.448,10	100,00	19.344.956,38	100	21.180.009,36	100	17.428.807,354	100

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Keterangan : ***) Angka sangat-sangat sementara

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan oleh paling besarnya kontribusi sektor pertanian berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2013 terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 27,13 persen. Kontribusi sektor terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 25,43 persen. Kontribusi sektor terbesar ketiga berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2013 adalah sektor jasa-jasa yang memberikan kontribusi

sebesar 17,81 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Ciamis pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor Jasa-jasa. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 70,37 persen dari total PDRB Kabupaten Ciamis. Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Ciamis sebagai daerah agraris dan perdagangan sehingga kontribusi sektor Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mendominasi struktur ekonomi Kabupaten. Selain itu, kontribusi sektor jasa-jasa (khususnya jasa administrasi pemerintahan dan pertanahan) memberikan kontribusi yang signifikan, hal ini merupakan sesuatu yang wajar mengingat fungsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Ciamis ditunjang dengan kelengkapan prasarana dan sarana skala Kabupaten.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6,2466 trilyun. Sedangkan kontribusi sektor PDRB terbesar tahun 2013 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sektor Pertanian, sektor Perdagangan hotel dan restoran, serta sektor Jasa-jasa. Gambaran PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun									
	2009		2010		2011		2012		2013 ^{***)}	
Sektor Primer	2.170.509,86	30,70	2.231.131,96	30,03	2.275.126,72	29,13	2.282.076,26	27,83	1.573.646,466	25,19
1 Pertanian	2.146.691,76	30,36	2.206.873,80	29,70	2.250.368,47	28,82	2.256.817,33	27,52	1.562.050,787	25,00
2 Pertambangan dan Penggalian	23.818,10	0,34	24.258,16	0,33	24.758,26	0,32	25.258,93	0,31	11.595,679	0,18
Sektor Sekunder	929.985,90	13,15	973.889,84	13,11	1.025.819,76	13,14	1.094.258,45	13,35	907.231,558	14,52
3 Industri Pengolahan	496.904,52	7,03	529.482,65	7,13	564.922,41	7,23	612.272,42	7,47	533.242,456	26,19
4 Listrik, Gas dan Air Bersih	44.658,54	0,63	49.955,56	0,67	54.631,74	0,7	59.853,66	0,73	46.453,339	10,25
5 Bangunan	388.422,84	5,49	394.451,63	5,31	406.265,60	5,2	422.132,37	5,15	327.535,763	17,64
Sektor Tersier	3.970.697,35	56,15	4.224.835,56	56,86	4.508.216,46	57,73	4.822.890,63	58,82	3.877.991,595	62,09
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.840.447,54	26,03	1.970.731,95	26,52	2.116.439,83	27,1	2.281.183,17	27,82	1.636.084,210	26,19
7 Pengangkutan dan Komunikasi	590.034,99	8,34	610.690,74	8,22	634.148,26	8,12	656.003,31	8	640.784,427	10,26
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	384.009,54	5,43	407.603,03	5,49	435.447,95	5,58	466.014,16	5,68	498.852,590	7,99
9 Jasa-jasa	1.156.205,28	16,35	1.235.809,84	16,63	1.322.180,42	16,93	1.419.689,99	17,31	1.102.270,368	17,64
PDRB	7.071.193,11	100	7.429.857,36	100	7.809.162,94	100	8.199.225,34	100	6.246.131,614	100

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Keterangan : ^{***)} Angka sangat-sangat sementara

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Ciamis pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor tersier yaitu 62,09%. Sedangkan kontribusi sektor primer pada tahun 2013 adalah sebesar 25,19% yang jika

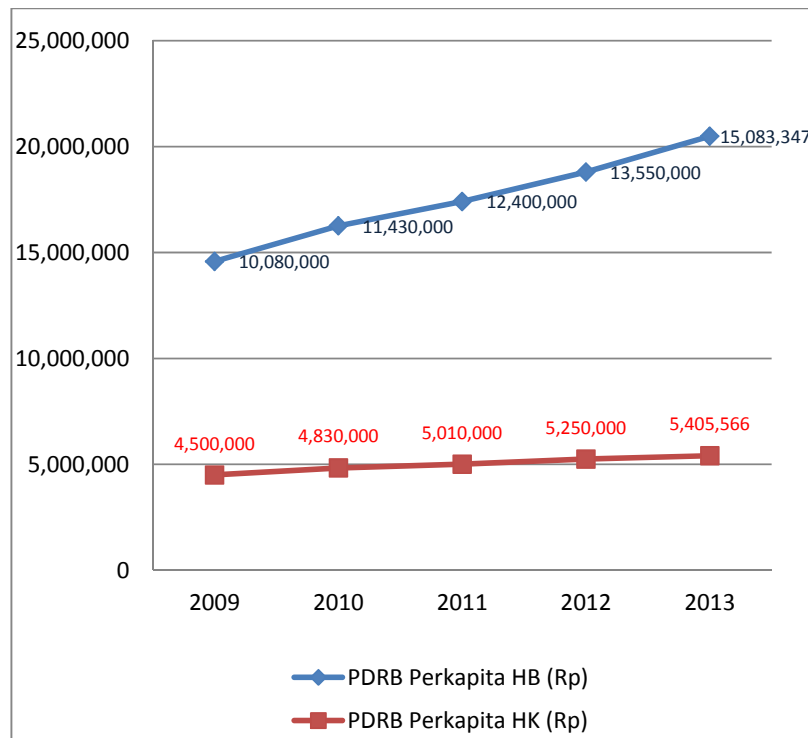
dibandingkan dengan kondisi masih 36 kecamatan pada Tahun 2012 mengalami penurunan.

b. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu meningkat dari Tahun 2012 yang mencapai 13,55 juta menjadi 15,083 juta pada Tahun 2013. Begitu pula dengan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis atas dasar harga konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Ciamis, pada Tahun 2012 mencapai 5,25 juta meningkat pada Tahun 2013 mencapai 5,405 juta pada Tahun 2013.

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.3
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013



c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 mengalami percepatan dibandingkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 sebesar 5,09 persen lebih cepat dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012 sebesar 4,99 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

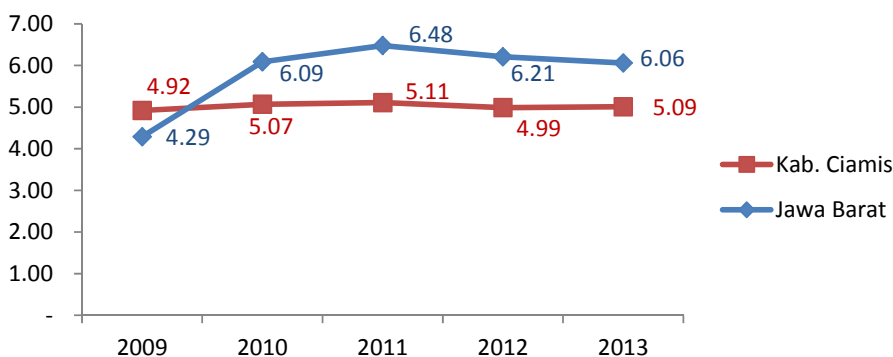
Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	2,01	2,80	1,97	0,29	2,64
2	Pertambangan dan Penggalian	0,10	1,85	2,06	2,02	2,02
3	Industri Pengolahan	7,23	6,56	6,69	8,38	7,50
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,71	11,86	9,36	9,56	6,58
5	Bangunan	2,91	1,55	3,00	3,91	3,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,36	7,08	7,39	7,78	6,83
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,84	3,50	3,84	3,45	3,65
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,79	6,14	6,83	7,02	6,66
9	Jasa-jasa	6,94	6,88	6,99	7,37	5,62
	PDRB	4,92	5,07	5,11	4,99	5,09

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2014

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 secara umum masih berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.4
Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2013



Apabila dibandingkan dengan daerah lain, maka dapat dinyatakan bahwa perkembangan LPE Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2012 berada di atas Kabupaten Majalengka, Kuningan dan Tasikmlaya, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar maka pertumbuhan LPE Kabupaten Ciamis masih berada di bawah. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Perbandingan LPE Kabupaten Ciamis dengan daerah sekitar
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2012

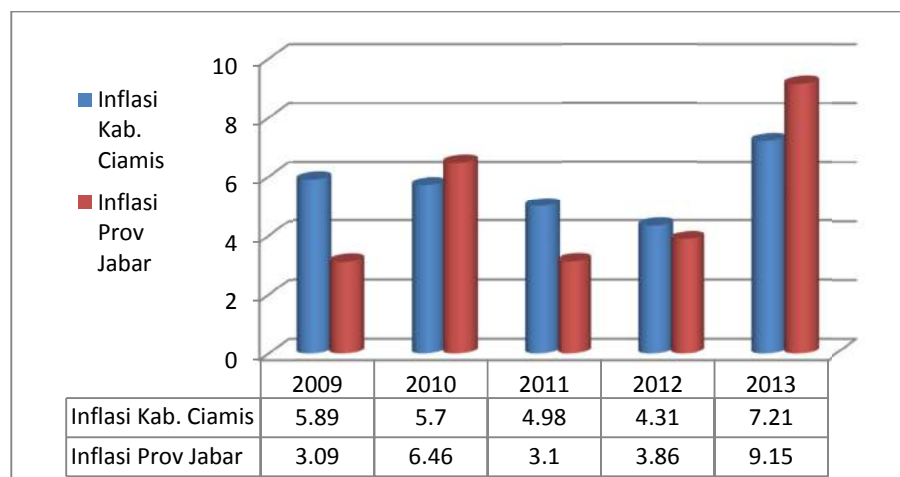
Kab/Kota	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Kab. Ciamis	4,92	5,07	5,11	4,99
Kab. Majalengka	4,73	4,59	4,67	4,74
Kab. Kuningan	4,39	4,99	5,43	4,73
Kab. Tasikmalaya	4,13	4,15	4,27	4,32
Kota Banjar	5,13	5,28	5,35	5,26
Kota Tasikmalaya	5,72	5,73	5,81	5,89
Jawa Barat	4,29	6,09	6,48	6,21

Sumber : Pusdalitbang Provinsi Jawa Barat

d. Tingkat Inflasi

Pada periode 2009-2012, tingkat inflasi di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan tetapi di Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2013 terjadi inflasi selama 10 bulan sedangkan deflasi terjadi selama 2 bulan yaitu pada bulan Februari dan November. Fluktuasi kenaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok relatif sering terjadi sepanjang Tahun 2013 terutama kebutuhan bahan makanan pokok. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 dapat terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.5
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2013



e. Gini Ratio

Pemerataan perekonomian daerah dapat dilihat dari tingkat pemerataan / distribusi pendapatan yang sering diukur dengan *koefisien gini*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah $G <$

0,40 berarti ketimpangan rendah, $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 terlihat bahwa *koefisien gini* di Kabupaten Ciamis terjadi fluktuasi dan berkecenderungan menurun. Pada tahun 2009 sebesar 0,315, kemudian turun menjadi 0,29 pada Tahun 2010-2011, dan pada Tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi 0,27. Pada Tahun 2013 meningkat menjadi 0,31. Secara umum ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Ciamis masih dalam tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dinyatakan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Ciamis masih relatif merata.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial diantaranya dapat diketahui melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Ciamis dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 senantiasa mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan perkembangan IPM daerah tetangga dan Provinsi Jawa Barat, maka Kabupaten Ciamis hampir sejajar dengan Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi masih berada di bawah Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya serta Provinsi Jawa Barat. Secara rinci perbandingan dan perkembangan IPM Kabupaten Ciamis, daerah tetangga dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.8
Perbandingan IPM Kabupaten Ciamis dengan daerah sekitar
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2012

Kab/Kota	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Kab. Ciamis	71,79	72,23	72,84	72,97
Kab. Majalengka	69,94	70,25	70,81	71,18
Kab. Kuningan	72,15	72,61	72,82	72,89
Kab. Tasikmalaya	71,67	71,88	72,18	72,93
Kota Banjar	74,25	74,67	74,95	76,39
Kota Tasikmalaya	73,96	74,4	74,85	75,35
Jawa Barat	71,64	72,29	72,73	73,11

Sumber : Pusdalitbang Provinsi Jawa Barat

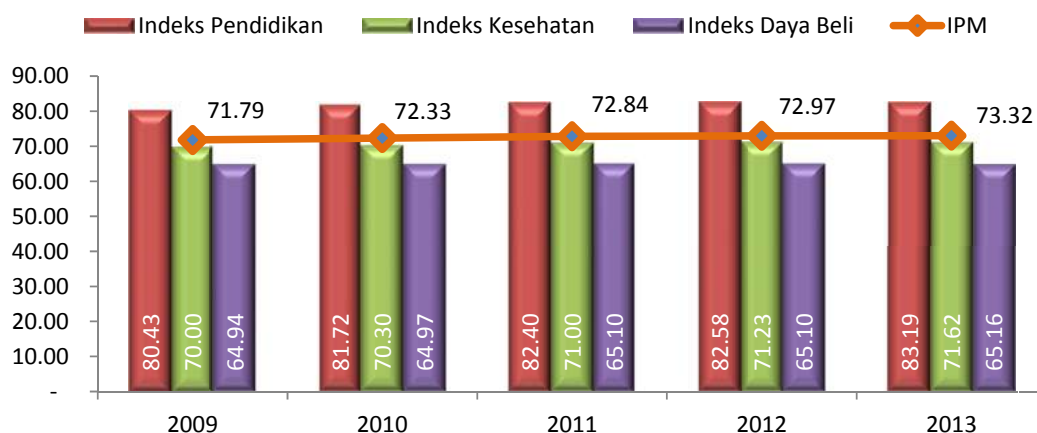
Indikator yang digunakan untuk menghitung IPM adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Perkembangan IPM Kabupaten Ciamis dari Tahun 2009-2013 dapat terlihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013

Indeks	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Indeks Pendidikan	80,43	81,72	82,40	82,58	83,19
Indeks Kesehatan	70,00	70,30	71,00	71,23	71,62
Indeks Daya Beli	64,94	64,97	65,10	65,10	65,16
IPM	71,79	72,33	72,84	72,97	73,32

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Grafik 2.6
Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013



Indeks Pendidikan

Komponen Indeks Pendidikan terdiri dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan AMH dan RLS di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2009-2013 mempunyai kecenderungan meningkat tiap tahunnya, walaupun angka kenaikannya masih relatif kecil.

- **Angka Melek Huruf (AMH)**

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2009-2013 mempunyai kecenderungan meningkat tiap tahunnya walaupun kenaikannya masih relatif kecil. Kenaikan AMH dipengaruhi oleh masih adanya pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dari Pemerintah Pusat. Perkembangan AMH di Kabupaten Ciamis Tahun 2009 s.d. 2013 adalah sebagaimana tabel berikut :

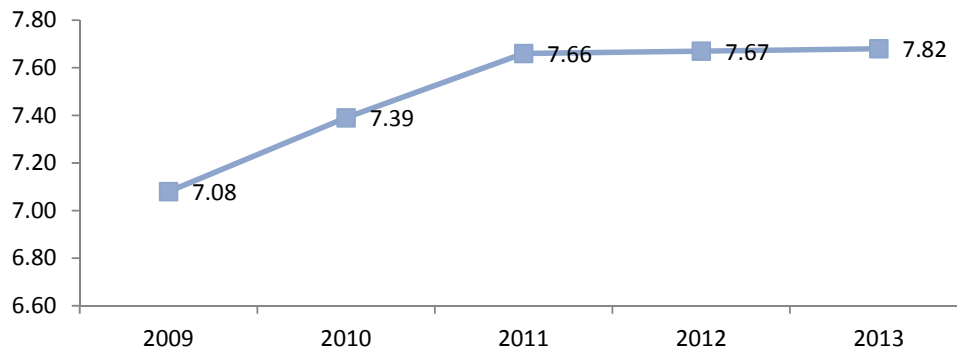
Tabel 2.10
Angka Melek Huruf di Kabupaten Ciamis Tahun 2008-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Melek Huruf	97,05	97,94	98,07	98,31	98,72

• **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Sama halnya dengan indikator AMH, RLS juga tiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun masih sangat kecil. Naiknnya nya Angka RLS ini disebabkan adanya kenaikan jumlah kelulusan. Perkembangan RLS dari Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

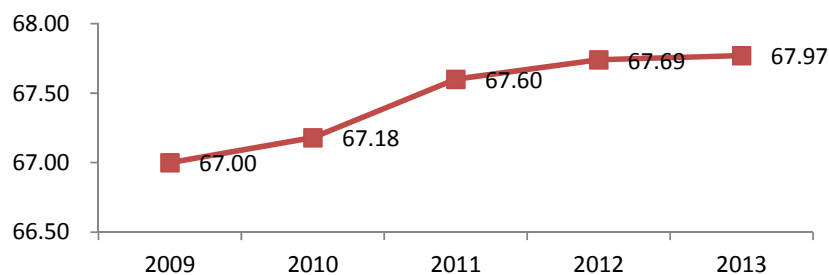
Grafik 2.7
Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



Indeks Kesehatan

Komponen Indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Ciamis sepanjang Tahun 2009-2013 mengalami peningkatan 0,97 poin, yaitu dari sebesar 67 tahun pada Tahun 2009 menjadi sebesar 67,97 tahun pada Tahun 2013. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :

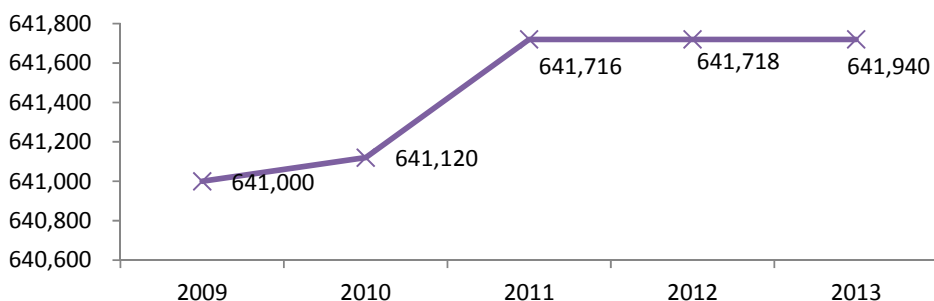
Grafik 2.8
Perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



Indeks Daya Beli

Komponen Indeks Daya Beli adalah Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Perkembangan Indeks Daya Beli di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013 dalam 5 tahun mengalami peningkatan, walaupun 3 tahun terakhir peningkatannya relatif sedikit sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2.9
Perkembangan Paritas Daya Beli di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial selain dapat diketahui melalui capaian IPM, juga dapat dilihat dari indikator lainnya pada bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan ketenagakerjaan.

a. Pendidikan

Analisis kinerja atas bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka *drop out* (DO). Perkembangan indikator dimaksud selama kurun waktu Tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Drop Out (DO) di Kabupaten Ciamis Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	APK					
	- SD/MI (%)	107,34	107,34	103,26	107,9	104,87
	- SMP/MTs (%)	98,18	99,44	98,25	98,99	98,14
	- SMA/SMK (%)	44,87	51,35	54,00	52,75	59,87
2	APM					
	- SD/MI (%)	99,74	97,6	97,35	99,85	98,72
	- SMP/MTs (%)	92,76	96,68	96,75	95,77	96,54
	- SMA/SMK (%)	41,87	44,11	46,55	47,75	51,91
3	Drop Out					
	- SD/MI(%)	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
	- SMP/MTs(%)	0,05	0,07	0,05	0,04	0,04
	- SMA/SMK/MA(%)	0,45	0,40	0,37	0,11	0,11

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah relatif tinggi kecuali untuk APK SMA/SMK/MA baru mencapai 59,87% pada Tahun 2013. Demikian pula Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan kecuali untuk APM SMA/SMK/MA yang baru mencapai 51,91% pada Tahun 2013. Adapun Angka *Drop Out* (DO) sebagian besar terjadi pada tingkat pendidikan SMP/ MTS serta SMA/SMK/MA. Keberhasilan peningkatan APK dan APM tidak terlepas dari adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan serta adanya program penambahan Unit Sekolah Baru dan BOS dari pemerintah.

b. Kesehatan

Analisis kinerja atas bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator Angka Gizi Buruk, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. Perkembangan dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Capaian Aspek Kesehatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Capaian Kabupaten Ciamis				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Gizi Buruk	0,30	0,23	0,22	0,24	0,15
2	Angka kematian Bayi/1.000 KH	40,22	39,48	38,91	37,70	28,30
3	Angka kematian Ibu	28	27	26	23	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dan BPS Kabupaten Ciamis, 2013

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu 5 Tahun cenderung mengalami peningkatan kinerja. Prevalensi balita gizi buruk cenderung mengalami penurunan, demikian juga dengan Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2012 (36 kecamatan) mencapai sebesar 37,70/1.000 KH dan pada tahun 2013 (26 Kecamatan) mencapai sebesar 28,30/1.000 KH, jauh mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar 40,22/1.000 KH. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Ciamis (36 Kecamatan) pada tahun 2009 sebanyak 28 kasus menurun menjadi 23 kasus di tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) berjumlah 18 Kasus. Prevalensi Gizi Buruk (AGB) pada Balita dimasyarakat pada tahun 2009 sebesar 0,30 Persen menurun menjadi sebesar 0,24 persen pada tahun 2012, sedangkan kondisi pada tahun 2013 (26 Kecamatan) sebesar 0,15 persen.

Peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, serta aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama pada tingkat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

c. Kemiskinan

Apabila dilihat dari Persentase kemiskinan, selama 5 tahun terakhir (Tahun 2009-2013) persentase kemiskinan di Kabupaten Ciamis cenderung mengalami penurunan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.13
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	174.530	158.464	156.283	148.600	109.546
2	Pesentase Penduduk Miskin (%)	11,23	10,34	9,98	9,60	9,30

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2009 penduduk miskin di Kabupaten Ciamis (36 Kecamatan) mencapai 11,23 % atau sebanyak 174.530 orang, pada tahun 2012 angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,63 %, sehingga menjadi 148.600 orang atau 9,6 %. Sedangkan pada tahun 2013 angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis (26 Kecamatan) adalah sebesar 9,4 % atau sebanyak 147.292 orang dan tergolong angka yang tinggi. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis merupakan tantangan bersama yang harus dijawab melalui program-program yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

d. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.14
Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka,
Tingkat Kesempatan Kerja dan Upah Minimum Kabupaten
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No.	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angkatan Kerja (orang)	776.993	761.982	711.501	790.395	785.000
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94	5,39	8,44	5,28	5,20
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,69	94,88	91,56	94,72	94,80

No.	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
4	Upah Minimum Kabupaten (Rp.)	636.195	699.815	741.800	793.750	854.075

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 5,50% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,28%.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni dan budaya di Kabupaten Ciamis mengalami kemajuan akan tetapi masih perlu terus ditingkatkan. Perkembangan seni budaya dan olah raga di Kabupaten Ciamis dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.15
Kelompok Kesenian, Kebudayaan dan Situs
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009 - 2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian (grup)	646	646	646	646	523
2	Jumlah gedung Kesenian (lokasi)	2	2	2	2	0
3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (lokasi)	2	2	2	2	10
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (lokasi)	325	325	325	325	331

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis

Pengembangan bidang olahraga, difokuskan pada pemenuhan peningkatan kualitas generasi muda melalui penyediaan fasilitas olah raga. Jumlah organisasi olah raga serta data gedung olah raga yang ada di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Jumlah Organisasi Olahraga dan Gedung Olahraga
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Organisasi Olahraga	278	314	323	338	248
2	Jumlah Gedung Olahraga	163	179	185	191	141

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

2.3. Aspek Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu : fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas 26 bidang, yaitu :

a. Pendidikan

Pelayanan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan. Capaian kinerja pembangunan pendidikan antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.17
Data Kinerja Layanan Pendidikan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
I	Pendidikan Dasar :					
1	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI / Penduduk Usia 7-12 Tahun	1:126	1:129	1:131	1:132	1:89
2	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs / Penduduk Usia 13-15 Tahun	1:243	1:239	1:232	1:241	1:335
3	Rasio Guru / Murid SD/MI	1 : 18	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1:17
4	Rasio Guru / Murid SMP/MTs	1 : 41	1 : 38	1 : 38	1 : 38	1:38
II	Pendidikan Menengah:					
1	Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/ SMK/MA / Penduduk Usia 16-18 Tahun	1:601	1:600	1:601	1:588	1:467
2	Rasio Guru/Murid	1 : 37	1 : 37	1 : 39	1 : 38	1:39
III	Fasilitas Pendidikan :					
1	Gedung SD/MI dalam kondisi baik	1.287	1.286	1.284	1.282	913
2	Gedung SMP/MTs dalam kondisi baik	370	373	374	378	196
3	Gedung SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	138	138	138	141	109

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

Tabel di atas menunjukkan bahwa daya tampung sekolah baik untuk pendidikan dasar maupun menengah secara umum sedikit mengalami peningkatan, akan tetapi setelah terbentuknya DOB Pangandaran daya tampungnya mengalami penurunan. Data ketersediaan guru yang ditunjukkan dengan angka rasio guru dengan murid untuk pendidikan dasar mengalami penurunan, sedangkan untuk pendidikan menengah mengalami angka rasio yang meningkat, hal ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan menengah mengalami kekurangan guru.

Fasilitas pendidikan dalam kondisi baik mengalami peningkatan, hal ini ditunjang dengan program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Angka partisipasi melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs masih tetap tinggi di atas 98 %, akan tetapi meskipun terjadi peningkatan, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA masih cukup rendah, baru mencapai 62% pada Tahun 2012.

b. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Ciamis antara lain :

Tabel 2.18
Data kinerja layanan kesehatan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio posyandu persatuan balita.	9,27	18,08	16,38	25,8	23,23
2	Rasio puskesmas persatuan penduduk.	0,032	0,030	0,029	0,029	0,027
	Rasio poliklinik per satuan penduduk.	-	-	-	0,007	0,014
	Rasio pustu per satuan penduduk.	0,074	0,069	0,068	0,067	0,0619
3	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,003	0,003	0,003	0,002	0,0029
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,049	0,057	0,047	0,055	0,0881
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan(%).	76,92	77,33	78,27	79,93	89,18
6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk.	0,071	0,078	0,075	0,091	0,7044
7	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	42,3	67,1	85,3	95,2	97,35
8	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	53,74	63,6	79,7	86,1	88,41
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	71,06	59,39	59,47	51,26	50,67
12	Cakupan kunjungan bayi (%).	66,26	68,41	72,76	81,27	86,31
13	Jumlah Puskesmas (buah)	51	51	52	52	37
14	Jumlah Puskesmas Pembantu (buah).	118	119	120	120	85

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel di atas secara umum kinerja bidang kesehatan mengalami peningkatan, meskipun beberapa indikator menunjukkan penurunan. Peningkatan yang signifikan terlihat dari indikator Cakupan pertolongan persalinan, Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan Cakupan kunjungan bayi. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran ibu untuk memeriksakan bayinya ke fasilitas kesehatan.

Sedangkan untuk Rasio dokter per satuan penduduk, Rasio tenaga medis per satuan penduduk dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan. Kedepan hal ini memerlukan strategi dan kebijakan yang lebih baik.

c. Pekerjaan Umum

Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan pelayanan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Ciamis tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	37,14	29,02	30,58	34,80	44,24
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	286,87	224,11	236,17	268,76	211,55
3	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik (Km)	206,1	207,3	208,7	210,2	209,3
4	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,291 (0,291)	0,292 (0,71)	0,342 (1,06)	0,343 (1,35)	20,727
5	Persentase Luas Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik	47,0 %	50,8 %	52,1 %	52,1 %	59,6 %
6	Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	0,79	1,62	2,39	3,16	4,12

Sumber : Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kabupaten Ciamis

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum bidang pekerjaan umum selama 5 tahun terakhir telah menunjukkan kinerja yang lebih baik meskipun peningkatannya relatif kecil. Hal ini diantaranya terlihat dari adanya peningkatan persentase kemantapan jalan dan panjang jalan dalam kondisi baik serta kondisi irigasi yang terus meningkat.

d. Perumahan

Pembangunan bidang perumahan bertujuan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kabupaten Ciamis dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.20
Data Kinerja Layanan Perumahan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase Rumah Layak Huni	66,66	66,67	66,68	66,69	66,67
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan	0	0	0	0	33,51
3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan	0,613	2,72	4,49	6,65	10,78
4	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	24	26	28	30	34

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis dan Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Ciamis

Beranjak dari tabel di atas maka dapat dinyatakan bahwa indikator kinerja perumahan di Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan dan perdesaan serta Persentase Rumah Tangga Bersanitasi. Indikator kinerja perumahan pasca pembentukan DOB Pangandaran memperlihatkan angka yang lebih baik lagi, akan tetapi hal ini perlu lebih dioptimalkan, baik pemeliharaan maupun kelembagaannya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah melestarikan ketersediaan air baku.

e. Penataan Ruang

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya difokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Kondisi capaian kinerja penataan ruang di Kabupaten Ciamis dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.21
Data Kinerja Layanan Penataan Ruang
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah rencana tata ruang (dokumen)	0	0	0	3	3
2	Kesesuaian Perizinan Terhadap RTRW (%)	60	65	67,50	70	100
3	Jumlah rencana tata bangunan dan lingkungan (dokumen)	0	0	0	0	5
4	Pengendalian alih fungsi lahan (%)	0	0,013	0,021	0,015	0,018

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah dokumen rencana tata ruang yang ada baru mencapai 3 dokumen dari 16 dokumen yang diamanatkan. Dalam konteks pengendalian, berdasarkan indikator Kesesuaian Perizinan Terhadap RTRW, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terjadi peningkatan. Hal ini seiring dengan proses perijinan yang mempertimbangkan keberadaan RTRW/RDTR.

Pengendalian alih fungsi lahan pada tahun 2012 adalah 0,015% dan pada Tahun 2013 setelah pembentukan DOB Pangandaran menjadi 0,018%. Hal ini berkaitan erat dengan pengendalian ketahanan pangan Kabupaten Ciamis serta Nasional dan upaya pelestarian kawasan konsevasi air dalam rangkaantisipasi krisis air dan perubahan iklim.

f. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemkab. Ciamis telah menyusun dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang tiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RPJMD selanjutnya telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan RKPD telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja.

g. Perhubungan

Pelayanan bidang perhubungan mengalami perbaikan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah sarana angkutan publik baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum. Perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi cukup signifikan, untuk tahun 2013 jumlah kendaraan sepeda motor sebanyak 199.458 buah dan untuk kendaraan mobil roda 4 sebanyak 16.147 buah.

Jumlah kendaraan angkutan umum bertambah, sehingga jumlah Uji KIR Kendaraan Angkutan Umum tiap tahunnya cenderung meningkat. Pada tahun 2009 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum adalah sebanyak 3.519 sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.529 kendaraan, sedangkan Jumlah Uji KIR Kendaraan Angkutan Tidak Umum tiap tahun mengalami fluktuatif dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dilaksanakan kegiatan cepat tepat murah dan mudah yaitu kegiatan Pengujian kendaraan bermotor keliling dengan cara jemput bola ke daerah-daerah tertentu maupun terminal-terminal. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu semula Rp. 25.000,- s.d Rp. 92.500,- menjadi Rp. 45.000,- s.d Rp. 140.000,-.

Jumlah terminal yang rusak pada tahun 2009 sebanyak 7 (tujuh) terminal yaitu terminal Cijulang, Banjarsari, Ciamis, Sindangkasih, Panumbangan, Rancah dan terminal Panjalu. Pada tahun 2011 dan 2012 dilakukan rehabilitasi terminal sehingga jumlah terminal yang rusak pada tahun 2013 menjadi berkurang.

Ijin trayek di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 pasca ditetapkannya Kabupaten Pangandaran menjadi 653 dari semula sebanyak 810, sedangkan untuk jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 3.019 unit dan untuk kendaraan tidak umum sebanyak 6.507 unit. Jumlah terminal bis sebanyak 11 buah dimana sebanyak 3 (tiga) unit di lokasi Kabupaten Pangandaran yaitu di Kecamatan Kalipucang, Cijulang dan Pangandaran. Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas sebanyak 140 buah. Untuk lama pengujian kelayakan angkutan umum, biaya pengujian dan pengadaan rambu lalu lintas relatif konstan sekalipun tanpa Kabupaten Pangandaran. Untuk ruas jalan kabupaten yang sudah dilayani angkutan penumpang umum sebanyak 10 ruas jalan.

h. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.

Persoalan persampahan merupakan salah satu dampak dari perkembangan sebuah kota, hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Ciamis dimana indikator persentase penanganan sampah pada Tahun 2013 masih sebesar 3,92%.

Penegakan hukum lingkungan dari Tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, jumlah laporan/pengaduan kasus pencemaran/erusakan lingkungan hidup yang terdata pada tahun 2013 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kasus dan semuanya berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Pada Tahun 2009-2011 Luas Wilayah RTH di perkotaan Kabupaten Ciamis adalah 1,15 %. Pada Tahun 2012 meningkat menjadi 1,20%. Setelah terbentuknya DOB Pangandaran luas wilayah RTH di Perkotaan Kabupaten Ciamis menjadi 1,29 %.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari fungsi koordinasi antar instansi, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.

i. Pertanahan

Kinerja pelayanan bidang pertanahan dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Penyelesaian Izin Lokasi (izin)	18	12	21	18	3
2	Penyelesaian pengadaan tanah Pemkab. Ciamis (lokasi)	3	3	3	5	4
3	Penyelesaian Permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemkab. Ciamis (lokasi)	24	32	23	24	16
4	Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan (kasus)	1	1	2	2	3

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Ciamis selama periode 2009-2013 adalah sebanyak 54 izin dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari peran BPPTPM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) sebagai sebuah badan layanan perijinan terpadu/satu atap.

Begitu pula dengan data pengadaan, pemanfaatan dan fasilitasi konflik pertanahan tiap tahunnya mengalami peningkatan, meski-pun pada tataran implementasinya perlu terus dioptimalkan.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dikelola secara baik. Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, telah dilaksanakan penyusunan database kependudukan sejak tahun 2009. Sejak dimulainya program pembuatan KTP SIAK (Kartu Tanda Penduduk berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan sistem

administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*, tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Ciamis semakin meningkat. Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Ciamis pada tahun 2009 sebesar 36,4%, meningkat menjadi 98,5% pada Tahun 2013. Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2009 sebesar 329 meningkat di Tahun 2013 menjadi sebesar 431. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan sehingga mempengaruhi keterlibatan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar.

Hal ini ditunjukkan oleh indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yang tiap tahun peningkatannya masih kecil, dimana pada Tahun 2009 sebesar 10,88% dan di Tahun 2013 sebesar 15,08%. Sedangkan untuk rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap tahunnya cukup mengalami fluktuatif dimana pada Tahun 2009 sebesar 15 kasus sedangkan di Tahun 2013 sebesar 21 kasus. Pemerintah Daerah telah berupaya seoptimal mungkin dalam penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, sehingga hampir 100% kasus yang terjadi dapat diselesaikan dan diberi bantuan hukum.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.23
Data kinerja keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	2,04	2,04	2,04	2,04	3,14
2	Cakupan peserta KB aktif	240.618	244.727	243.100	247.907	178,047
3	Pasangan Usia Subur (PUS)	314.592	315.739	311.139	316.893	231.923
4	% Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	76,49	77,51	78,13	78,23	75,9
5	Peserta KB Pria	3.629	3.684	3.817	3.938	2.625
6	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	366	352	356	409	324

Sumber : BKBMPD Kabupaten Ciamis

Tabel di atas menggambarkan bahwa perkembangan peserta KB aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2009 sebanyak 240.618 orang meningkat menjadi sebanyak 247.907 orang pada Tahun 2012 dan setelah pemekaran wilayah (Tahun 2013) menjadi 178.047 orang. Peserta KB aktif ini perlu menjadi perhatian agar laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ciamis tetap dapat dikendalikan. Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya cukup mengalami fluktuatif, dimana jumlah PUS pada tahun 2009 sebanyak 315.592 pasangan dan pada Tahun 2013 setelah pemekaran wilayah menjadi sebanyak 231.923 pasangan. Hal ini menggambarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ber-KB telah meningkat.

m. Sosial

Pelaksanaan pembangunan bidang sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti sosial hingga tahun 2013 berjumlah 58 buah. Sedangkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan Pemerintah Daerah dengan berbagai cara, salah satunya melalui pendampingan dan pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2009 sebanyak 95 orang menjadi sebanyak 12.373 orang pada Tahun 2013. Begitu pula dengan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga mengalami peningkatan, pada Tahun 2009 sebanyak 1.084 orang dan di Tahun 2013 menjadi sebanyak 13.759 orang. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menangani permasalahan PMKS.

n. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat capaian kinerja pelaksanaan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.24
Capaian Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	93,69	94,88	91,56	94,74	94,8
2	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	1,2	51,47	10,70	23,79	8,31
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,94	5,39	8,44	5,28	5,20

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ciamis

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2009-2013 cukup mengalami fluktuatif dimana pada Tahun 2009 sebesar 93,69% dan meningkat di Tahun 2013 sebesar 94,8%. Begitu pula dengan tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Ciamis, setiap tahunnya cukup fluktuatif dimana Tahun 2009 sebesar 1,2% dan di Tahun 2013 sebesar 8,31%. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan informasi data penempatan tenaga kerja masih belum optimal untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Ciamis. Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ciamis cukup fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2009 sebesar 5,94% dan menurun di Tahun 2013 sebesar 5,20%. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Kabupaten Ciamis, menjadi faktor pendorong dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, terutama pada sektor industri pengolahan.

o. Koperasi dan UKM

Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Ciamis meliputi koperasi dan UMKM. Perkembangan koperasi di Kabupaten Ciamis belum menggembirakan, dimana persentase koperasi aktif di Tahun 2009 sebesar 45% menjadi 44%, pada Tahun 2012 dan Pada Tahun 2013 sebesar 40 %. Sedangkan jumlah usaha Mikro dan Kecil setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2009 sebanyak 22.121 unit meningkat di Tahun 2012 menjadi sebanyak 24.977 unit. Keberadaan Koperasi dan UMKM perlu mendapat perhatian bersama karena koperasi dan UKM memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi.

p. Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar pula investasi yang ditanamkan di daerah tersebut.

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Ciamis tidak mengalami peningkatan, dimana nilai investasi PMA pada Tahun 2009-2012 sebesar Rp. 10,615 milyar. Lain halnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebesar Rp.23,10 milyar meningkat di Tahun 2012 sebesar Rp. 48,25 milyar. Begitu juga untuk nilai investasi Non PMA/PMDN cukup mengalami peningkatan yang signifikan di Tahun 2011 sebesar Rp. 45,95 milyar meningkat di Tahun 2013 sebesar Rp. 189,34 milyar.

q. Kebudayaan

Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang kebudayaan dapat dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.25
Data kinerja Kebudayaan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian	646	646	646	646	523
2	Jumlah gedung Kesenian	0	0	0	0	0
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	16	16	16	16	16
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	325	325	325	325	331

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Ciamis

Berdasarkan tabel di atas jumlah gedung kesenian sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya jumlahnya sangat terbatas yaitu baru 2 unit, begitu juga dengan grup kesenian selama periode 2009-2012 jumlahnya tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 646 grup. Hal ini perlu perhatian bersama karena Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi seni dan budaya yang beranekaragam.

r. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan, sehingga pengembangan minat dan bakat pemuda melalui organisasi kepemudaan serta menumbuhkembangkan budaya olah raga perlu terus diupayakan. Kondisi Tahun 2011-2012 secara umum menunjukkan angka yang tetap kecuali untuk gedung olah raga yang mengalami peningkatan. Organisasi pemuda berjumlah 237 dan organisasi olahraga berjumlah 94. Begitu pula dengan kegiatan kepemudaan berjumlah 158 dan kegiatan olah raga 307. Adapun jumlah lapangan olahraga adalah sebanyak 1.358 unit. Gedung olahraga pada Tahun 2009 sebanyak 163 unit menjadi 191 pada Tahun 2012. Kondisi Tahun 2013 setelah pembentukan DOB Pangandaran, Jumlah organisasi pemuda berjumlah 173, organisasi pemuda berjumlah 65, kegiatan kepemudaan berjumlah 113, kegiatan olah raga berjumlah 238, lapangan olah raga berjumlah 1.016 unit dan gedung olah raga berjumlah 141 unit.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa melakukan upaya menjaga kondusivitas dan peningkatan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi masyarakat. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban Pemkab

Ciamis meningkatkan jalinan hubungan dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP yang dilaksanakan pada tahun 2009 – 2012 yaitu sebanyak 1 kegiatan sedangkan untuk kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2009 dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dan pada tahun 2011 sebanyak 1 kegiatan. Pada tahun 2013 di 26 kecamatan kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan dan kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 1 kegiatan.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran keadaan tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dijelaskan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.26
Data kinerja bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,38	0,34	0,34	0,30	0,27
2	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	60	56	48	48	48
3	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	19	19	37	36	36
4	Penegakan PERDA	3	19	52	66	45
5	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1	1	1	1	1
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten)	70%	70%	72%	72%	85%
7	Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	9.792	9.792	8.275	8.275	6.248

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Rasio jumlah Polisi Pamong Praja, Jumlah Linmas dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten mengalami penurunan, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2009 sebesar 0,38 menurun menjadi 0,27 pada tahun 2013. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2009 sebanyak 60 orang juga mengalami penurunan menjadi 48 orang pada tahun 2013. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2009 sebanyak 70% mengalami peningkatan menjadi 85% pada tahun 2013.

u. Ketahanan Pangan

Upaya yang telah dilakukan dalam bidang ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada peningkatan ketersediaan, pemerataan distribusi dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang saja, namun juga difokuskan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta secara aktif mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan yang telah diterbitkan adalah :

- a. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.778-Huk/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis.
- b. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2011 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- c. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 570.1/Kpts.305-Huk/ 2010 tentang Penetapan Lokasi Desa Pelaksana Kegiatan dan tenaga Pendamping Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- d. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 521.1/ Kpts.155-Huk/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tenaga Pendamping.
- e. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Ciamis.

Sementara itu ketersediaan pangan utama (beras) pada Tahun 2011 adalah 528.720,70 ton dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 432.016,67 ton.

v. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) dan Posyandu aktif. Jumlah PKK, LPM dan posyandu dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah PKK sebanyak 350 sejak Tahun 2011 meningkat menjadi 353. Jumlah LPM pada tahun 2009-2012 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 350 sementara jumlah posyandu aktif mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 2.050 dan pada tahun 2012 sebanyak 2.084. Sedangkan kondisi pada tahun 2013 di 26 kecamatan jumlah PKK adalah sebanyak 265, jumlah LPM sebanyak 260 dan posyandu aktif sebanyak 1.577.

w. Statistik

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja diperlukan untuk administrasi pemerintahan saja tetapi juga dibutuhkan untuk kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Ketersediaan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan.

Data produk-produk statistik hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik diantaranya buku Ciamis Dalam Angka, buku PDRB Kabupaten Ciamis, buku PDRB per kecamatan, buku PDRB menurut Penggunaan, buku Indeks Harga Konsumen, buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, buku Indeks Kemahalan Konstruksi, buku tabel input dan output, buku IPM dan buku Analisis Kemiskinan Kabupaten Ciamis.

x. Kearsipan

Pengelolaan dan ketersediaan arsip yang baik harus memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan. Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Perkembangan jumlah SDM pengelola kearsipan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2009 sebanyak 37 orang meningkat pada Tahun 2013 sebanyak 2098 orang, sedangkan perkembangan pengadaan arsip secara baku dari tahun 2009 mencapai 11,03% meningkat di tahun 2013 menjadi sebesar 16,36%.

y. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam bentuk *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib sebagai salah satu pelayanan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut harus diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana Informasi dan komunikasi seperti informasi yang dapat diakses melalui *website*. Sejak Tahun 2009, *website* resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat diakses dengan menggunakan internet dengan alamat : www.ciamiskab.go.id, yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

z. Perpustakaan

Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah berupaya meingkatkan layanan perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Jumlah perpustakaan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 175 unit dan dilengkapi dengan 3 mobil perpustakaan keliling. Jumlah pengunjung perpustakaan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 mengalami peningkatan, pada Tahun 2009 jumlah pengunjung sebanyak 25.647 orang meningkat menjadi 28.223 orang pada Tahun 2013. Begitu pula jumlah koleksi buku yang tersedia mengalami peningkatan dari 21.141 buku pada Tahun 2009 menjadi 48.189 buku pada Tahun 2013.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis

dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut :

a. Pertanian

Pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Ciamis lebih diarahkan terhadap komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan. Gambaran potensi pertanian selama lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan
Kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

NO	POTENSI	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
A	Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton)					
1	Produksi Padi	721.915	783.524	772.325	688.891	525.665
2	Produksi Jagung	49.098	47.845	51.876	51876	28.284
3	Produksi Kacang Tanah	5.142	4.081	2.977	3.872	2.641
4	Produksi Kacang Kedelai	7.042	2.298	5.674	3.362	1.390
5	Produksi Kacang Hijau	1.229	117	922	864	416
6	Produksi Ubi Kayu	106.050	80.786	83.979	111.242	79.164
7	Produksi Ubi Jalar	8.427	7.886	9.403	9946	5.841
B	Komoditi Perkebunan (ton)					
1	Produksi Kelapa	42.748,16	42.952,25	37.516,16	37.890,22	18.775,18
2	Produksi Kako	2.032,80	340,9	620,19	638,24	445,72
3	Produksi Cengkeh	532,63	533,75	114,25	114,25	56,84
4	Produksi Teh	660,01	448,84	331,89	331,89	335,21
5	Produksi Kopi	1.401,01	1.419,97	944,62	951,93	639,13
C	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura					
1	Produktivitas padi (ku/Ha)	64,16	64,00	63,94	64,94	64,61
2	Produktivitas jagung (ku/Ha)	64,20	65,13	64,93	66,79	68,73
3	Produktivitas kedelai (ku/Ha)	15,14	15,15	15,94	15,20	13,92
4	Produktivitas cabe merah (ku/Ha)	112,91	129,76	127,21	125,18	102,00
5	Produktivitas pisang (Kg/rumpun)	14,00	12,00	17,00	19,00	20,00
6	Produktivitas manggis (Kg/pohon)	56,00	58,00	24,00	47,00	70,00
D	Komoditi Peternakan					
1	Produksi Daging Ternak (kg)					
	- Sapi	1.811.216	1.823.785	1.830.623	1.913.011	1.076.719

NO	POTENSI	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
	- Kerbau	143.887	145.179	110,629	108,413	79.198
	- Domba	538.836	540.733	549,367	585,075	379.742
	- Kambing	359.130	379.432	422,096	422,542	284.767
2	Produksi Daging Unggas (kg)					
	- Ayam Buras	2.805.039	2.868.373	2,910,557	2,912,012	1.298.435
	- Ayam Ras Pedaging	56.228.074	66.427.158	67.634.317	67.639.199	67.131.386
	- Itik	166.311	171.155	173,501	179,833	91.878
3	Produksi Telur (kg)					
	- Ayam Buras	1.602.886	1.385.376	1.300.383	1.241.507	860.234
	- Ayam Ras Petelur	5.396.526	5.405.950	5,866,534	6,364,864	4.678.539
	- Itik	1.402.290	1.341.904	1.341.240	1.419.184	959.099
4	Produksi Susu (liter)	924.036	1.373.669	814.408	394.926	51.552
5	Jumlah ternak yang masuk Kab. Ciamis (ekor)					
	- Sapi	13.370	11.970	8,017	9,216	4.565
	- Kerbau	377	406	299	97	849
	- Domba	7.159	6.861	13,346	11,040	4.153
	- Kambing	6.272	5.902	6,990	4,734	3.121
6	Jumlah ternak yang keluar Kab. Ciamis (ekor)					
	- Sapi	9.423	9.623	8.017	6,050	7.611
	- Kerbau	123	133	1,885	217	1.011
	- Domba	27.794	27.848	33,867	22,164	40.245
	- Kambing	17.004	17.130	30,732	39,306	14.426
7	Jumlah unggas yang keluar Kab. Ciamis (ekor)					
	- Ayam Buras	621.824	666.877	716,874	728,813	58.244
	- Ayam Ras	69.173.860	76.049.075	76,049,871	76,059,825	72.515.517
	- Itik	127.144	131.031	140,875	140,924	177.159
E	Kontribusi terhadap PDRB (%)					
1	Kontribusi sektor pertanian	30,50	30,52	29,93	28,82	27,13
2	Kontribusi sektor perkebunan	2,61	2,51	2,43	2,36	2,15

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ciamis

b. Kehutanan

Pembangunan kehutanan di Kabupaten Ciamis sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk optimalisasi fungsi kawasan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat. Selain itu pembangunan sektor kehutanan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan kapasitas serta keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat

perubahan eksternal. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Gambaran umum kehutanan di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28
Data kinerja Kehutanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	2.675	1.754	2.170	2.100	1.510
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) AHB	0,47	0,45	0,43	0,44	0,41
3	Produksi kayu hutan Rakyat (m ³)	428.095,15	286.154,43	450.488,81	324.193,28	284.384,25
4	Produksi kayu hutan Negara(m ³)	48.626,55	38.564,75	27.474,06	40.291,00	27.350,68

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ciamis

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara umum sektor pertambangan di Kabupaten Ciamis menunjukkan perkembangan yang positif. Potensi sumber daya mineral tersebar di beberapa kecamatan. Saat ini potensi mineral logam dan non logam sedang dalam penelitian (eksplorasi). Apabila hasil eksplorasi dan studi kelayakannya dinyatakan positif, maka diharapkan sektor pertambangan akan menyumbang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ciamis. Wilayah Ciamis juga memiliki potensi kawasan karst yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan geowisata.

Capaian kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dalam kurun waktu Tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi karena beberapa hal, antara lain tidak beroperasinya lagi perusahaan tambang karena bahan baku yang sudah habis dan belum adanya investor yang baru serta naiknya sektor-sektor yang lain. Selain itu terbatasnya data mengenai potensi sumber daya mineral sehingga potensi sumber daya bahan galian belum terukurnya sehingga mengakibatkan kurangnya investor di sektor pertambangan.

Rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Ciamis pada tahun 2009 sebesar 60% terjadi peningkatan di tahun 2013 yaitu sebesar 69,42%. Selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Ciamis meskipun persentasenya masih kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri agar ke depan rasio elektrifikasi rumah tangga perlu ditingkatkan.

d. Pariwisata

Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.945.587 orang meningkat dari tahun 2012 sebanyak 1.584.422 orang. Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar 6,77%. meningkat dari tahun 2012

sebesar 6,77%. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 2.29
Data kinerja Pariwisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kunjungan wisatawan (orang)	1.232.313	1.386.145	1.584.422	1.510.589	393.692
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB HB (%)	5,80	5,99	6,35	6,77	5,87

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ciamis

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan dari Tahun 2009 s/d 2012 mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi 393.692 orang. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan jumlah obyek wisata karena masuk ke wilayah DOB Pangandaran. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan % kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

e. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama dua tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsumsi ikan. Keberhasilan bidang perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Data Kinerja Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Produksi perikanan (ton)	16.016,40	23.168,98	24.702,91	29.432,69	29.432.73
2	Budi Daya Air Tawar (KAT) (Ha)	2.636,78	2.636,78	2,636.78	2,636.78	2.064.72
3	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	14,73	15,19	15,98	16,92	19,61
4	Cakupan bina kelompok Nelayan (KUB)	25	76	105	114	-

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis

f. Perdagangan

Pada tahun 2012, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 20,65% meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 20,56%. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Ciamis selama tahun 2012 sebesar US\$ 190,226 Milyar meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar US\$ 128,298 Milyar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31
Data Kinerja Perdagangan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	20,48	20,69	20,56	20,65	20,60
2	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	137,036	124,297	128,298	190,226	272,059
3	Cakupan bina usaha informal (PKL)	15	15	20	25	25

Keterangan : Menggunakan asumsi dari neraca perdagangan Prov. Jabar dimana Kabupaten Ciamis % ekspor sebesar 0,01% dari total ekspor Jawa Barat

g. Perindustrian

Pada tahun 2013, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,72% meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 6,99%. Pada Tahun 2012 jumlah industri di Kabupaten Ciamis mengalami pertumbuhan sebesar 0,14% menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang sebesar 0,21%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan pada tahun 2013 terdapat 22.471 buah dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 22.051 buah. Jumlah pengrajin yang dibina selama tahun 2013 sebanyak 15 pengrajin. Data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.32
Data kinerja Perindustrian di Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)	6,72	6,71	6,78	6,99	7,72
2	Pertumbuhan Industri (%)	0,1	0,06	0,21	0,14	0,27
3	Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah)	21,919	21,945	22,021	22,051	22,471
4	Cakupan bina pengrajin (%)	10	10	12	16	15

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Ciamis

h. Ketransmigrasian

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Transmigran yang difasilitasi Pemkab pada tahun 2009 sebanyak 38 KK atau 149 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi sebanyak 17 KK atau 68 jiwa. Untuk Pelatihan calon transmigran pada tahun 2009 sebanyak 35 KK, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi sebanyak 20 KK.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita). Hasil analisis konsumsi Rumah Tangga perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.33
Angka Konsumsi Rumah Tangga perkapita
Tahun 2009 s.d 2013 di Kabupaten Ciamis

NO	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Total Pengeluaran Rumah Tangga (juta Rupiah)	9.220	9.260	6.850
2.	Jumlah penduduk	1.560.021	1.562.886	1.155.500
3.	Rasio (1./2.)	492.534	493.759	494.032

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- b. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dapat disajikan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34
Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Ciamis Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Indeks yang Diterima Petani (It)	129,47	150,88	162,53	113,23
2	Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	130,67	139,48	145,70	108,84
3	NTP	99,28	108,17	111,55	104,04

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator Sarana Perekonomian, Jaringan Listrik dan Penataan Wilayah. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

a. Sarana Perekonomian

Jumlah Restoran di Kabupaten Ciamis terdapat peningkatan, pada tahun 2011 terdapat 131 buah dan meningkat pada tahun 2012 sebanyak 146 buah. Sedangkan untuk hotel di Kabupaten Ciamis tidak terdapat peningkatan yang signifikan di tahun 2011 dan 2012, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35
Jumlah Restoran dan Hotel di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Jumlah Restoran/rumah makan (buah)	181	209	149
2	Jumlah Hotel (buah)	77	85	10
	- Hotel Berbintang	1	1	0
	- Hotel Non Berbintang	76	84	10

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Ciamis

b. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Rasio elektrifikasi desa hampir mencapai 100%, akan tetapi data rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Ciamis pada tahun 2013 masih sebesar 69,42%. Hal ini berarti harus ada upaya lebih optimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

c. Penataan Wilayah

1) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditandai dengan persentase kesesuaian perijinan terhadap rencana tata ruang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2009 sebesar 60% dan pada Tahun 2013 sebesar 100%.

2) Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Ciamis disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36
Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Ciamis
Tahun 2009-2011

NO	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Luas Wilayah produktif (Ha)	165.513,72	102.362,06	102.362,06
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	167.362,72	140.563,06	140.563,06
3.	Rasio (1/2) (Ha)	98,90	72,80	72,80

Sumber : Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kab. Ciamis

Ket: Perhitungan berdasarkan seluruh luasan kawasan budidaya (140.563,06 Ha atau 57,49%) tanpa memasukan luas kawasan untuk pemukiman dan tegalan (23.001,00 Ha atau 9,41%)

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Selain indikator angka kriminalitas dan demo, indikator yang menunjukkan iklim investasi adalah kondisi pelayanan perijinan dan peraturan yang mendukung iklim usaha.

Pelayanan perijinan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan sampai saat ini telah menunjukkan kinerja yang lebih baik, akan tetapi sistem informasi pelayanan perijinan sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Begitu pula dengan peraturan yang menunjang iklim usaha, sampai saat ini belum dapat berjalan secara optimal.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3. Rasio ketergantungan di Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Rasio Ketergantungan Tahun 2009-2013 di Kabupaten Ciamis

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	392.800	399.157	419.013	412.693	418.050
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	127.420	143.189	145.053	145.344	139.507
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1)&(2)	520.222	542.276	564.066	557.997	557.557
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.137.416	1.167.966	1.210.123	1.231.124	1.267.335
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,46	0,46	0,47	0,45	0,44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.38
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2009 - 2013 Kabupaten Ciamis

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah lulusan S1	8.049	9.267	9.370	10.474	9,874
2.	Jumlah lulusan S2	402	524	530	583	518
3.	Jumlah lulusan S3	3	3	4	8	0
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	8.454	9.794	9.904	11.065	10.392
5.	Jumlah penduduk	1.606.778	1.605.414	1.720.280	1.774.032	1.372.846
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,52	0,61	0,58	0,62	0,75

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ciamis

Berdasarkan tabel di atas, untuk Jumlah lulusan S1 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 8.049, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 9.874. Untuk Jumlah lulusan S2 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 402, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 518. Untuk Jumlah lulusan S3 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 3, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) tidak ada. Untuk Jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 8.454, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 10.392. Untuk Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 0,52, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 0,75.



BAB III

ANALISIS ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah akan timbul karena terjadinya kesenjangan ekspektasi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan. Adanya kesenjangan ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat ini. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis diawali dengan identifikasi permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peluang dan tantangan dimasa datang terutama setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah.

Rumusan permasalahan pembangunan menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ciamis ke depan (terutama periode 2014-2019 dan 2019-2024). Agar permasalahan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dapat digambarkan secara sistematis, maka penyajiannya dikelompokkan berdasarkan bidang pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dapat diuraikan berdasarkan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah, sebagai berikut:

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib

Urusan wajib Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis meliputi 26 urusan. Permasalahan pembangunan daerah pada Urusan Wajib di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Ciamis, salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah sektor pendidikan. Porsi anggaran urusan pendidikan tiap tahunnya selalu meningkat, terutama alokasi anggaran untuk perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan harapan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Meskipun indikator pendidikan berupa : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, pendidikan

yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan telah menunjukkan perbaikan, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu :

- Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah angka *dropout* masih tinggi, sementara dilain pihak minat untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi masih rendah.
- Belum terpenuhinya standar mutu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Masih rendahnya akses masyarakat kepada layanan pendidikan yang berkualitas.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama untuk pendidikan dasar dan tenaga pengajar PAUD.

b. Kesehatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai penunjang kesehatan masyarakat, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu penanganan, antara lain :

- Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang aksesibilitas pelayanan kesehatan dan belum optimalnya standarisasi pelayanan kesehatan.
- Belum optimalnya pelaksanaan system kewaspadaan dini (Surveillans Epidemiologi) penyakit dalam menghindari terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana, pengendalian dan pencegahan penyakit.
- Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan pelayanan kesehatan.

c. Pekerjaan Umum

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan salah satu prioritas program yang senantiasa dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Indikator kinerja yang diukur diantaranya adalah jumlah jaringan jalan dalam kondisi baik, peningkatan jaringan irigasi dan penyediaan air bersih, sebagai penunjang perekonomian masyarakat yang selama ini telah menunjukkan perbaikan. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang teridentifikasi, yaitu :

- Masih terbatasnya irigasi teknis untuk pertanian tanaman pangan.
- Masih rendahnya kualitas jalan, sehingga menghambat pergerakan orang dan barang.
- Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah.
- Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan infrastruktur wilayah.

Selain permasalahan tersebut, terdapat pula tantangan kedepan berupa pembangunan transportasi yang mendukung pengembangan kegiatan

perekonomian dan kemasyarakatan melalui peningkatan kualitas jalan/status jalan yang memberikan kemudahan akses bagi pengembangan simpul-simpul kegiatan ekonomi masyarakat dan menunjang pengembangan iklim investasi, seperti ; dibangunnya jalur jalan Ciamis-Majalengka (ke lokasi rencana Bandara Internasional di Jawa Barat); dibangunnya jalan Lingkar Utara ibukota; Pengaktifan jalur jalan Lingkar Selatan ibukota; peningkatan kualitas jalan; Rencana tata ruang disusun sampai tingkat RTBL dalam skala 1:1000; dibangunnya terminal terpadu; dibangunnya jalan tol Banjar-Ciamis-Bandung, pembangunan Bendung Matenggeng.

d. Perumahan

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman perlu diupayakan secara berkelanjutan melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pencapaian MDG's. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Masih terbatasnya penyediaan air bersih di perkotaan dan perdesaan.
- Layanan pengelolaan dan pengolahan limbah khususnya sampah belum optimal.
- Belum terciptanya lingkungan permukiman yang sehat.
- Masih terdapat rumah yang tidak layak huni dan belum menggunakan listrik.

e. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang efisien dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan penataan ruang yang teridentifikasi adalah :

- Belum optimalnya penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan ruang/lahan serta pemekaran wilayah.
- Belum terjaminnya kepastian lahan bagi kegiatan pelaku usaha.
- Masih terbatasnya data spasial wilayah.
- Belum optimalnya pemahaman dan pelaksanaan peraturan penataan ruang.

Tantangan penataan ruang di Kabupaten Ciamis adalah terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi wilayah daerah; keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan skala pelayanan; menjamin keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dengan pengaturan dan pengendalian kawasan lindung dan kawasan budi daya serta adanya jaminan kepada para investor dengan memberikan arahan alokasi ruang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah; dan meminimalkan risiko bencana dan dampak lingkungan lainnya dengan pengendalian tata ruang, dan pengendalian lingkungan, serta Rencana tata ruang yang disusun sampai tingkat RTBL dalam skala 1:1000.

f. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dokumen tersebut setelah dilakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan, kemudian ditetapkan menjadi sebuah peraturan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Permasalahan yang dihadapi adalah belum padunya antara sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran.

g. Perhubungan

Pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah adalah pemasangan rambu-rambu lalu lintas secara bertahap dan peningkatan pengawasan terhadap operasional angkutan umum. Permasalahan perhubungan teridentifikasi adalah :

- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi darat.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas perhubungan untuk menunjang kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

h. Lingkungan Hidup

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan hidup adalah pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara baik dan benar, sehingga berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Belum optimalnya upaya pengendalian lingkungan hidup, dikarenakan : masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan, masih terjadinya kerusakan hutan terutama di kawasan hulu/ kawasan mata air dan masih terjadinya pencemaran air.
- Belum optimalnya penanganan sampah terutama di wilayah cakupan pelayanan.
- Belum optimalnya luasan kawasan lindung dan berfungsi lindung.

Tantangan lingkungan hidup adalah ; Terjadinya perubahan iklim global yang mengakibatkan perubahan dan pergeseran musim, masih terjadinya penjarahan atau perambahan hutan, terjadinya kerusakan lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas penambangan liar.

i. Pertanian

Penertiban lahan di Kabupaten Ciamis menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah dimana sertifikasi tanah menjadi tolak ukur untuk kepastian dalam kepemilikan tanah.

Permasalahan pertanian adalah masih belum jelasnya pengelolaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan masih terdapatnya tanah asset yang belum disertifikasi.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya harus diimbangi dengan pengelolaan administrasi kependudukan yang lebih baik. Permasalahan kependudukan yang teridentifikasi adalah :

- Database kependudukan belum akurat, yang disebabkan kurangnya petugas registra, sistem aplikasi belum lengkap dan validasi data belum optimal.
- Pelayanan kependudukan masih kurang optimal, dikarenakan masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola kependudukan, sarana mobilitas pelayanan dan belum adanya kelembagaan/unit pelayanan kependudukan di wilayah.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh-kembang anak. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

- Masih rendahnya peranan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan.
- Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu dioptimalkan.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu program nasional di dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB). Permasalahan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah :

- Masih rendahnya usia perkawinan, yaitu rata-rata 18,22 Tahun dan usia kawin pertama perempuan, *Total Fertility Rate (TFR)* sebesar 2,13.
- Masih terjadinya ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
- Pelaksanaan pelayanan KB masih belum optimal sesuai standar dan masih rendahnya pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri, juga kesertaan ber-KB khususnya pria.
- Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga.

m. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan jumlah masyarakat miskin menjadi perhatian Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Permasalahan sosial yang teridentifikasi :

- Terjadinya berbagai krisis sosial, antara lain : menipisnya pengamalan agama dan nilai-nilai budaya, munculnya gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi ekonomi masyarakat, terjadinya bencana alam; dan sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- Terdapatnya permasalahan kemiskinan yang disebabkan : kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya

keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dan aksesibilitas dalam memanfaatkan potensi daerah untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan ekonomi.

- Penanganan PMKS belum optimal.

n. Ketenagakerjaan

Tingkat migrasi keluar Kabupaten Ciamis setiap tahunnya meningkat, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Ciamis. Permasalahan ketenagakerjaan :

- Masih terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga angka urbanisasi tinggi.
- Belum adanya kelembagaan Balai Latihan Kerja, sehingga tenaga kerja yang ada di Kabupaten Ciamis kurang kompetitif.

o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan menjadi penggerak roda ekonomi di suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Peran koperasi sangat penting untuk peningkatan potensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal, penyedia informasi serta sebagai lembaga distribusi dan pemasaran. Permasalahan koperasi dan usaha kecil dan menengah :

- Banyaknya Koperasi/KUD yang kondisinya sudah tidak sehat dan memprihatinkan, sehingga banyak yang sudah tidak beraktifitas lagi. Hal ini disebabkan oleh kurang dikuasainya manajemen umum oleh pengurus maupun anggota, kelembagaan koperasi tersebut, begitu pula dengan permodalan, aktiva dan likuiditas belum termasuk dalam standar koperasi yang sehat.
- Masih banyaknya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya termasuk akses modal yang berasal dari perbankan.

p. Penanaman Modal

Salah satu indikator pertumbuhan di suatu wilayah adalah peningkatan jumlah investasi yang masuk. Permasalahan penanaman modal yang teridentifikasi ialah :

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data, informasi dan promosi potensi daerah untuk kebutuhan investasi.
- Belum adanya pola kemitraan yang jelas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan investasi.
- Pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu belum optimal.

q. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan juga merupakan sarana promosi yang dapat meningkatkan

pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian budaya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya dan melakukan upaya menjaga dan melestarikannya. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Nilai-nilai luhur budaya masyarakat Tatar Galuh dirasa semakin terkikis, seperti : budaya hidup bergotong-royong, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, saling percaya dan rasa cinta daerah sendiri.
- Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- Pengembangan potensi seni, budaya, sejarah dan keurbakalaan belum dapat tergali secara optimal dikarenakan masih kurangnya tenaga ahli dan sarana dan prasarana yang memadai.

r. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan, sedangkan jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kemampuan berkompetisi secara sehat dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah dalam bidang olah raga. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta prestasi olahraga yang perlu terus ditingkatkan.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda termasuk fasilitas olah raga.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menitikberatkan pada kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta kegiatan pembinaan politik di daerah. Pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat perlu diikuti dengan peningkatan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma yang tumbuh di masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Partisipasi warga dalam kehidupan politik belum optimal.
- Menurunnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa khususnya generasi muda, akibat pengaruh era globalisasi dan belum optimalnya pembinaan.
- Masih terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran Perda.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Struktur lembaga pemerintah daerah masih cukup besar, pengembangan kompetensi dan pendayagunaan aparatur belum optimal serta pelayanan publik masih belum memuaskan.

- Pendapatan Asli Daerah peningkatannya relatif kecil dan kemampuan pengelolaan potensi sumberdaya alam, keuangan dan asset daerah masih belum optimal.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparat.
- Belum optimalnya kerjasama kemitraan dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (swasta).
- Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Masih belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dikarenakan keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) dan sarana penunjang pengawasan.
- Belum optimalnya peranserta masyarakat dan stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana.

u. Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum optimalnya pengelolaan, ketersediaan dan keamanan, serta pelaksanaan diversifikasi pangan masyarakat.
- Masih terjadinya alih fungsi lahan.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi subyek tetapi lebih dioptimalkan menjadi obyek pembangunan, sehingga hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Belum optimalnya peran serta kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Masih belum optimalnya pelayanan pemerintahan desa.

w. Statistik

Dokumen statistik suatu daerah dibutuhkan oleh pemerintah (daerah maupun pusat) dalam mendapatkan data kondisi dan perkembangan daerah tersebut secara umum sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan serta rencana tata ruang, bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Permasalahan yang teridentifikasi :

- *Updating* data dasar belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pengolahan data dan statistik.

x. Kearsipan

Peningkatan kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam Pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi. Permasalahan yang teridentifikasi adalah pengelolaan kearsipan daerah yang belum optimal.

y. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan sarana komunikasi dan informatika yang memadai sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara *up to date* terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan eksternal di Kabupaten Ciamis. Permasalahan yang dihadapi :

- Akses informatika masyarakat desa masih terbatas.
- Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Komunikasi dan Informatika masih terbatas.
- Sarana dan prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika masih terbatas.

z. Perpustakaan

Peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang berkualitas. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan. Permasalahan yang teridentifikasi adalah :

- Masih rendahnya minat membaca masyarakat, atau kurangnya minat untuk berkunjung ke Perpustakaan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana Perpustakaan serta masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola.

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat pilihan di Kabupaten Ciamis meliputi 8 urusan. Adapaun beberapa permasalahan pembangunan daerah pada Urusan Wajib Pilihan diuraikan sebagai berikut :

a. Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dinilai cukup besar, mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Ciamis bekerja pada sektor pertanian. Pertanian dimaksud adalah pengertian pertanian dalam arti luas, yaitu : pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, peternakan dan perkebunan. Potensi pertanian dan tingginya kontribusi pertanian terhadap PDRB masih belum sebanding dengan perbaikan taraf hidup petani.

Permasalahan yang teridentifikasi :

- Persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian (petani, buruh tani, peternak, perikanan) perlahan-lahan mengalami penurunan.
- Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya sarana dan prasarana pertanian masih terbatas, penerapan teknologi pertanian yang belum optimal dan pengendalian hama dan penyakit yang belum terpadu serta terdapat kondisi musim yang tidak menentu.

- Belum optimalnya pengendalian penyakit hewan dan berkurangnya populasi ternak sapi potong, karena sebagian besar populasinya masuk wilayah Kabupaten Pangandaran.
- Kurangnya bibit ternak unggul dan produksi sumber pakan ternak ruminansia semakin berkurang, karena adanya alih fungsi lahan pertanian dan berkurangnya lahan pengangonan.
- Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan belum adanya BUMD di sektor pertanian.

b. Kehutanan

Pemerintah daerah dituntut lebih optimal dalam memelihara kawasan hutan, meningkatkan penegakan hukum dan mengendalikan perubahan tata guna lahan terutama di lahan kritis, untuk mencegah terjadinya bencana (berupa banjir, kekurangan air, erosi, longsor, dsb). Selain berfungsi lindung kehutanan juga berfungsi sosial dan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Masih terdapatnya lahan kritis terutama di lahan negara (eks HGU) yang status pengelolaannya (hak kelola) masih belum jelas.
- Belum optimalnya pengelolaan fungsi kawasan lindung yang berada pada lahan milik masyarakat, diantaranya karena banyak lahan-lahan pada kawasan lindung yang beralih fungsi.
- Belum adanya zonasi kesesuaian lahan pengembangan komoditas kehutanan dan database kehutanan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan kehutanan.
- Masih terjadinya perselisihan tata batas antara kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani dengan lahan milik masyarakat.
- Pengelolaan dan pengembangan DAS yang bersifat multisektor belum terkoordinasi dengan baik.
- Nilai tambah pemanfaatan potensi hasil hutan masih relatif rendah dan sistem tata niaga yang belum berpihak kepada petani.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan energi dan sumber daya mineral yang teridentifikasi adalah :

- Masih banyaknya potensi sumberdaya energi dan sumberdaya mineral yang belum tergali.
- Masih terdapatnya rumah yang belum menggunakan listrik.

d. Pariwisata

Pemerintah Daerah perlu terus melakukan upaya dalam meningkatkan daya saing obyek wisata yang ada dan optimalisasi potensi destinasi wisata baru dengan melakukan promosi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukungnya. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Belum optimalnya pengelolaan obyek wisata yang ada dan masih banyaknya potensi wisata yang belum tergali.

- Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan pesona/sadar wisata masih relatif rendah.
- Masih relatif rendahnya minat investasi dan kerjasama dibidang kepariwisataan hal ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya : masih terbatasnya promosi kepariwisataan dan masih terbatasnya sarana prasarana serta akses pendukung obyek wisata.

e. Kelautan dan Perikanan

Pasca pemekaran wilayah, sektor perikanan di Kabupaten Ciamis perlu lebih menfokuskan diri terhadap perikanan darat, dengan melaksanakan pembinaan terhadap para peternak ikan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas ikan yang dihasilkan. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana perikanan dan belum adanya perencanaan pengembangan perikanan yang jelas.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembudidaya.

f. Perdagangan

Perdagangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perdagangan di Kabupaten Ciamis diarahkan pada peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
- Belum optimalnya pengelolaan pasar dan pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang telah ada, seperti P2BMOK dan STA.
- Pola tata niaga dan manajemen usaha yang masih sederhana dan terpadu dalam satu kesatuan sistem tata niaga. Hal ini disebabkan kerjasama diantara para pelaku usaha belum terjalin secara optimal.
- Kurangnya informasi pasar, potensi investasi, pelayanan perdagangan dan kemetropolitan, sehingga pelaku usaha perdagangan masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

g. Perindustrian

Pembangunan perindustrian di Kabupaten Ciamis diarahkan untuk Peningkatan produktivitas dan akses UMKM kepada sumberdaya produktif dan peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas. Permasalahan yang dihadapi :

- Masih rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), seperti : dalam mengembangkan pencitraan produk unggulan maupun produk rumah tangga belum disertifikasikan, kemasan belum layak dan sesuai standar, produk kurang dikenal dan kapasitasnya masih terbatas serta harganya belum dapat bersaing.
- Keterbatasan modal kerja, sarana mesin dan peralatan produksi yang kurang memadai, teknologi yang digunakan masih sederhana, kemasan produk masih sederhana dan kurang menarik sehingga belum dapat dipasarkan ke toko/pasar modern.
- Masih rendahnya kemampuan manajemen IKM dalam berproduksi, pengelolaan keuangan maupun pemasaran produknya.
- Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar pelaku IKM.

h. Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana yang menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya kemiskinan pada masyarakat adalah adanya keterbatasan sumber ekonomi dan tidak mempunyai asset produktif, maka melalui program transmigrasi dipandang perlu untuk mendapatkan tempat baru yang potensi sumber daya alamnya dapat digali. Permasalahan yang teridentifikasi :

- Penanganan transmigrasi regional belum optimal.
- Lokasi transmigrasi lokal belum dimanfaatkan secara optimal.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ciamis dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah lain di sekitar Kabupaten Ciamis.

3.2.1. Penelaahan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Perumusan isu strategis Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.1.
Identifikasi Isu Strategis

ISU STRATEGIS	
KEBIJAKAN NASIONAL (RPJP NASIONAL)	KEBIJAKAN PROVINSI (RPJPD PROV. JAWA BARAT)
Mengurangi jumlah penduduk miskin	Pengangguran dan ketenagakerjaan
Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan	Kualitas dan akseptabilitas pendidikan dan kesehatan
meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	
Menurunkan angka kematian balita	
Menurunkan angka kematian ibu melahirkan	
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat	Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat
	Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah
Menurunkan pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk dan persebarannya
Pembangunan jatidiri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air.	Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial.
Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana baik kualitas maupun cakupan pelayanan	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
Pemerataan pembangunan	
Mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah	
Meningkatkan profesionalisme birokrasi	
Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	

3.2.2. Penelaahan RPJP Daerah Lain

Penentuan isu-isu strategis di Kabupaten Ciamis dalam proses perumusannya perlu memperhatikan pula isu-isu strategis daerah lain. Penelaahan RPJPD daerah lain diperlukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan dan adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan. Selain itu penelaahan terhadap RPJPD daerah lain dilakukan dengan pertimbangan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya di daerah perbatasan dua wilayah) serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Tabel 3.2
Identifikasi RPJP Daerah Lain
(Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya)

DAERAH LAIN	PERIODE RPJPD	KEBIJAKAN
Kabupaten Majalengka	RPJPD 2005-2025	1 Meningkatkan derajat kesehatan
		2 Meningkatkan kualitas pendidikan
		3 Meningkatkan pemahaman, pengamalan agama dan budaya
		4 Mengendalikan jumlah penduduk
		5 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
		6 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
		7 Meningkatkan kualitas tenaga kerja
		8 Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		9 Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		10 Pengembangan teknologi pertanian
		11 Peningkatan nilai tambah produk pertanian
		12 Pengembangan industri unggulan
		13 Peningkatan iklim investasi
		14 Peningkatan permodalan
		15 Peningkatan keanekaragaman dan mutu perdagangan barang dan jasa dalam negeri dan ekspor
		16 Pengembangan potensi pariwisata sehingga mampu mendorong perekonomian daerah
		17 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi
		18 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi
		19 Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Minum

DAERAH LAIN	PERIODE RPJPD	KEBIJAKAN
		20 Pelayanan Energi dan Telekomunikasi
		21 Pengembangan Perumahan Rakyat.
		22 Penanganan Persampahan
		23 Pemanfaatan dan Pengendalian Penggunaan Ruang
		24 Peningkatan Kualitas Aparatur
		25 Penegakan Hukum
		26 Peningkatan Partisipasi Politik
		27 Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Kota Tasikmalaya	RPJPD 2005-2025	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
		2 Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah
		3 Penguatan lembaga legislatif
		4 Pemenuhan kebutuhan akan prasar dan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah
		5 Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya secara layak
		6 Tersedianya prasarana sistem persampahan dan sistem perpipaan air bersih untuk lebih dari 80% masyarakat Kota Tasikmalaya
		7 Terciptanya sistem pelayanan jasa publik yang transparan, handal dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
		8 Terwujudnya masyarakat yang agamis, berakhlak, beradab, berbudaya dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang universal
		9 Alokasi kegiatan belanja pemerintah harus ditekankan pada upaya-upaya pengembangan jiwa entrepreneurship dari para pelaku ekonomi di Kota Tasikmalaya
		10 ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai
		11 Peningkatan wajib belajar di atas sembilan tahun
		12 Kemampuan ekonomi yang diatas tingkat subsistensinya
		13 Menjaga kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, air dan hutan
		14 Revitalisasi prasarana dan sarana pariwisata

3.2.3. Isu-isu Strategis Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelaahan dan memperhatikan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis serta isu-isu strategis jangka panjang nasional serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
- 2) Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan.
- 3) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4) Peningkatan daya beli masyarakat.
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan.
- 6) Peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 8) Peningkatan kualitas LH dan penanganan bencana alam.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan jangka panjang bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun merupakan komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan yang didasarkan pada realita untuk menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi dirumuskan sebagai tindak lanjut hasil analisis terhadap isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD). Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah :

“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”

Dengan Iman dan Taqwa bermakna bahwa “Keimanan dan Ketaqwaan” (yakni : berkeyakinan kuat bahwa tiada TUHAN kecuali ALLOH dalam menjalani hidup dan kehidupan selalu berpegang pada ajaran agama secara konsekuen) harus melandasi dan menjiwai seluruh perilaku aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Maju bermakna suatu kondisi yang dicapai untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan kesetaraan dengan daerah lain, dilihat dari indikator sosial (pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial), indikator ekonomi (pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan kualitas, pendapatan perkapita, daya beli) dan penyelenggaraan pemerintahan.

Mandiri bermakna suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan potensi yang ada di daerah, sehingga mampu menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendorong peran serta *stakeholder* dalam pembangunan. Demikian pula masyarakat dapat memberdayakan potensi dirinya sehingga mampu mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dan berperan aktif sebagai mitra pemerintah.

Sejahtera bermakna suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang mantap, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2025 yaitu : “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”, memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun 2025, yaitu : “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, serta Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yaitu : “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi RPJP Nasional, Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat
dan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis

Visi RPJP Nasional	Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat	Visi RPJPD Kabupaten Ciamis
	Dengan Iman dan Taqwa	Dengan Iman dan Taqwa
Mandiri		Mandiri
Maju	Sehat	Maju
	Cerdas	
Adil	Sejahtera	Sejahtera
Makmur		

4.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh *stakeholder*. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD diharapkan mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan dan untuk perubahan RPJPD ini lebih dikhususkan untuk 2 (dua) periode akhir yaitu : Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan terukur. Misi pembangunan jangka panjang daerah disusun berdasarkan pokok-pokok visi, sebagai hasil pendefinisian visi. Pokok-pokok visi disusun dengan memperhatikan masukan *stakeholder* yang menjadi pelaku dan atau terkena dampak pelaksanaan pembangunan.

Proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Ciamis melalui proses pendefinisian visi menjadi pokok-pokok visi dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ciamis

Visi	Misi	
Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia
	2	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Visi	Misi	
	3	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
	4	Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah

Tabel 4.3
Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Misi RPJP Nasional	Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat	Misi RPJPD Kabupaten Ciamis
1 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia
2 Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu		
3 Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2 Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
4 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	3 Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari	3 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
5 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional		
6 Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional		
7 Mewujudkan bangsa yang berdayasaing	4 Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah	4 Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah
8 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan	

Makna yang terkandung dalam Misi Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengamalan agama, keterampilan, sikap mental aparatur dan masyarakat melalui pendidikan formal, non formal dan informal, sejalan dengan perkembangan IPTEKS yang dilandasi Iman dan Taqwa serta memiliki kompetensi dan profesionalisme yang didukung oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Terselenggaranya fasilitasi, regulasi, dan supervisi dari pemerintah yang profesional, ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, adil dan bertanggung jawab, transparan, demokratis, efektif, dan efisien dengan dukungan masyarakat secara luas dan didorong dengan semangat kebersamaan dan kesalehan sosial, mampu menegakkan supremasi hukum serta dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui, merupakan modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan sehingga penggalian, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal untuk menjamin peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang diikuti dengan upaya penataan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan guna menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

4) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah

Upaya untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, industri dan pertambangan yang didukung infrastruktur dan pusat kajian yang memadai, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli secara merata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

5.1. Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai, khususnya untuk 10 tahun mendatang. Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, sedangkan sasaran pokok merupakan langkah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara rinci hasil rumusan tujuan dan sasaran pokok berdasarkan misi adalah sebagaimana matrik berikut :

Matrik 5.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan ahlak mulia masyarakat.
	2 Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berperan dalam pembangunan	1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional, berpengetahuan berbudaya dan berwawasan, mampu menerapkan IPTEKS terutama yang bersifat terapan serta mampu mengembangkan seni, olahraga, kreativitas dan inovasi.
		2 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, pengembangan sarana dan prasarana yang bermutu sehingga tercipta masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.
		3 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan kemandirian, keuletan dan kemitraan.
2 Meningkatkan penyelenggaraan	1 Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	1 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih, diwujudkan

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
<p>pemerintahan yang baik</p>		<p>dengan sosok dan perilaku aparaturnya yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.</p>
		<p>2 Terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah, yang didukung oleh semakin besar peran pendapatan daerah, semakin efektif dan efisien belanja daerah untuk pembangunan, serta pengelolaan dan keuangan daerah dan asset daerah secara profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.</p>
		<p>3 Terwujudnya manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil bagi seluruh masyarakat.</p>
		<p>4 Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh produk hukum daerah</p>
<p>3 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan</p>	<p>1 Meningkatnya hasil pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan</p>	<p>1 Tertata, terpelihara dan terlindunginya ketersediaan sumber daya alam yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>2 Tergali, terkelola dan termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal melalui pengelolaan lingkungan yang serasi, seimbang dan lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi guna membangun struktur perekonomian yang tangguh, prasarana dasar permukiman dan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
		memiliki keunggulan kompetitif, melalui pendekatan keseimbangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
4 Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah	1 Meningkatnya kemampuan perekonomian daerah	1 Terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya produksi yang menguntungkan pelaku usaha, produksi yang tinggi baik kuantitas maupun kualitas, perubahan bahan baku menjadi barang hasil olahan, arus barang ke luar pasar lokal yang tinggi diikuti dengan semakin berkurangnya arus barang sejenis masuk ke pasar lokal.
		2 Terbangunnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis pada bisnis unggulan (<i>core bussiness</i>) yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, serta pertambangan dan energi sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan sektor lainnya yang menghasilkan produk yang terpasarkan (<i>marketable</i>) dan berkelanjutan.
		3 Tercapainya pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan daya beli masyarakat yang tinggi.
		4 Terbangunnya komitmen, kerjasama dengan pelaku usaha/investor dalam rangka memberdayakan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat
		5 Meningkatnya investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kesempatan berusaha
	2 Terwujudnya ketahanan pangan	1 Tersedianya produk pangan yang cukup, bermutu, aman, serta memiliki nilai ekonomi yang kompetitif.
	3 Terwujudnya infrastruktur yang baik dalam mendukung aktivitas ekonomi	1 Terbangunnya jaringan informasi sebagai pusat pengembangan informasi potensi Kabupaten Ciamis.
2 Terbangunnya jaringan transportasi, irigasi dan infrastruktur wilayah lainnya		

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok
		yang representatif sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, sasaran pokok disusun pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya. Selanjutnya untuk menjelaskan target pencapaian sasaran pokok, dirumuskan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada matrik berikut :

Matrik 5.2
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Ciamis 2005-2025

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia	1 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan ahlak mulia masyarakat.	1 Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.	
		2 Meningkatkan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur.	
	2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional, berpengetahuan, berbudaya dan berwawasan, mampu menerapkan IPTEKS terutama yang bersifat terapan serta mampu mengembangkan seni, olahraga, kreativitas dan inovasi.	3 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya	1 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan
			2 Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan kualitas baik
			3 Meningkatnya jumlah rata-rata lamanya penduduk bersekolah hingga mencapai lebih dari 8 tahun
			4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa di tingkat SD, SMP dan SMA hingga mencapai 100%
			5 Meningkatnya peran lembaga pendidikan tinggi
			6 Meningkatnya pemerataan mutu, relevansi pendidikan umum dan <i>life skill</i>
			7 Terpeliharanya nilai-nilai seni dan budaya
			8 Meningkatnya prestasi olahraga
1 Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan kualitas baik			

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja
	manusia yang berkualitas dan profesional, pengembangan sarana dan prasarana yang bermutu sehingga tercipta masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.	2 Peningkatan AHH hingga mendekati usia 70 tahun
		3 Penurunan AKB hingga mencapai target dibawah <i>new MDGs</i>
		4 Penurunan AKI hingga mencapai target dibawah <i>new MDGs</i>
		5 Penurunan Angka Gizi Buruk hingga mencapai angka dibawah 5 persen
		6 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		4 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan kemandirian, keuletan dan kemitraan.
	2 Jumlah Penduduk Miskin dibawah 5%	
	3 Menurunnya persentase Rumah Tidak Layak Huni menjadi kurang dari 30%	
	4 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	
	2 Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	1 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, diwujudkan dengan sosok dan perilaku aparatur yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.
2 Ketersediaan <i>Website</i> di setiap SKPD		
3 Persentase lelang kegiatan melalui LPSE diatas 50%.		
2 Terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah, yang didukung oleh semakin besar peran pendapatan daerah, semakin efektif dan efisien belanja daerah untuk pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah secara profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		1 Kualitas Pengelolaan Keuangan yang dibuktikan dengan pencapaian WTP setiap tahun anggaran
		2 Persentase jumlah PAD terhadap APBD diatas 10%
3 Terwujudnya manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan,		1 Lama Proses Perijinan tidak melebihi 5 hari kerja
		2 Ketersediaan sistem informasi

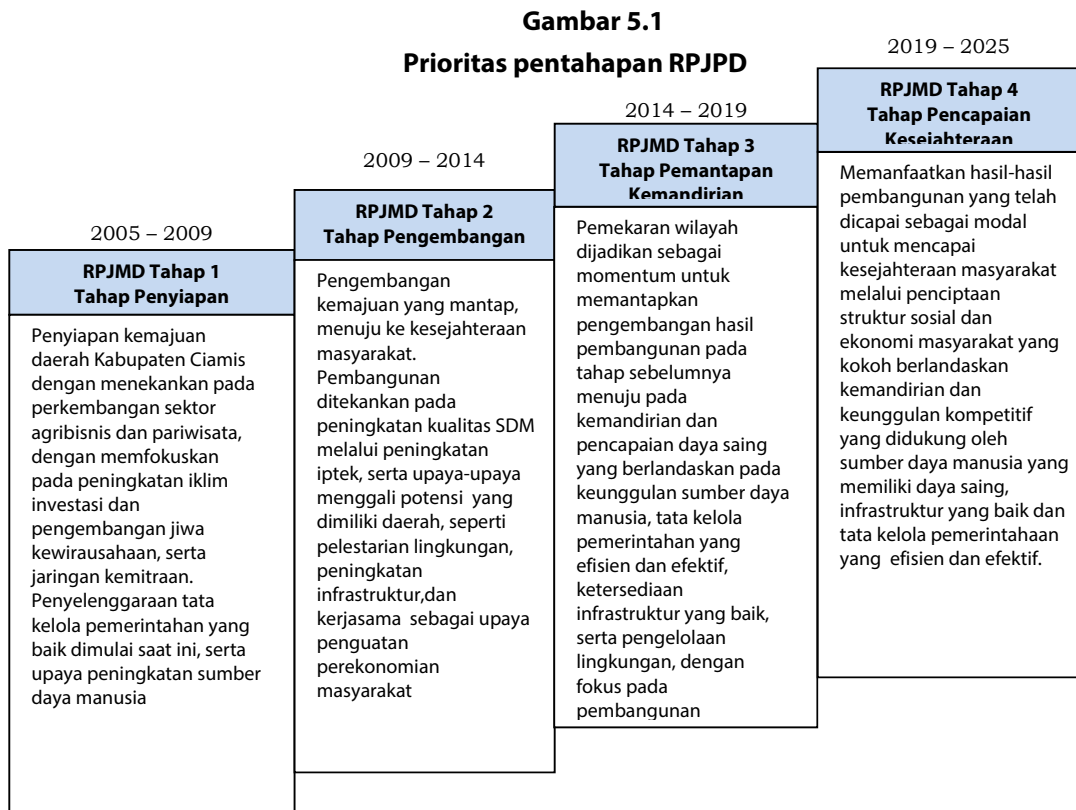
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja
	akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil bagi seluruh masyarakat.	manajemen pelayanan publik di masing-masing SKPD terkait
	4 Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh produk hukum daerah	Penurunan angka pelanggaran terhadap Perda tidak lebih dari 20%
3 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1 Tertata, terpelihara dan terlindunginya ketersediaan sumber daya alam yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	1 Persentase jumlah kerusakan hutan kurang dari 5%
		2 Persentase Perusahaan yang mempunyai dokumen Amdal dan IPAL meningkat sebesar 50%
	2 Tergali, terkelola dan termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal melalui pengelolaan lingkungan yang serasi, seimbang dan lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi guna membangun struktur perekonomian yang tangguh, prasarana dasar permukiman dan memiliki keunggulan kompetitif, melalui pendekatan keseimbangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	1 Meningkatnya Izin penambangan dan penggalian yang memiliki analisis dampak lingkungan sebesar 40%
		2 Meningkatnya reklamasi lahan pertambangan dan penggalian sebesar 5 % per tahun
4 Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah	1 Terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya produksi yang menguntungkan pelaku usaha, produksi yang tinggi baik kuantitas maupun kualitas, perubahan bahan baku menjadi barang hasil olahan, arus barang ke luar pasar lokal yang tinggi diikuti dengan semakin berkurangnya arus barang sejenis masuk pasar lokal.	1 Pertumbuhan ekonomi daerah di atas 6% per tahun
		2 Tingkat pengangguran terbuka di bawah 4%
		3 Meningkatnya arus bongkar muat orang, dan barang per tahun sebesar 6%
	2 Terbangunnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis pada bisnis unggulan	1 Penentuan sektor dan komoditas unggulan Kabupaten Ciamis per 5 tahun

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja
	(core bussiness) yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata serta pertambangan dan energi sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan sektor lainnya yang menghasilkan produk yang terpasarkan (<i>marketable</i>) dan berkelanjutan.	2 Peningkatan jumlah unit usaha manufaktur sektor dan komoditas unggulan
		3 Persentase peningkatan ekspor sektor dan komoditas unggulan sebesar 5% per tahun
	3 Tercapainya pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan daya beli masyarakat yang tinggi.	1 Pertumbuhan ekonomi di atas 6%
		2 Pendapatan perkapita masyarakat mencapai angka diatas Rp. 17 juta per tahun
		3 Indeks Daya Beli mencapai angka di atas 70
	4 Meningkatnya investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kesempatan berusaha	1 Peningkatan kesempatan kerja di atas 96%
		2 Peningkatan Investasi berskala menengah dan Besar sebesar 5% terhadap PDRB
		3 Peningkatan unit usaha UMKM sebesar 3% per tahun
	5 Tersedianya produk pangan yang cukup, bermutu, aman, serta memiliki nilai ekonomi yang kompetitif.	1 Ketersediaan pangan utama mencapai angka 70%
		2 Angka inflasi pangan tidak melebihi angka 5%
	6 Terbangunnya komitmen, kerjasama dengan pelaku usaha/investor dalam rangka memberdayakan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.	Pertumbuhan Pembinaan UMKM sebesar 5% per tahun
	7 Terbangunnya jaringan informasi sebagai pusat pengembangan informasi potensi Kabupaten Ciamis.	Terbangunnya sistem informasi penanaman modal daerah
	8 Terbangunnya jaringan transportasi, irigasi dan infrastruktur wilayah lainnya yang representatif sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Proporsi jalan baik sebesar 70%

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah per lima tahun yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka

mencapai Kabupaten Ciamis yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengadaaan dana. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Prioritas tahapan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah sebagaimana gambar berikut :



Pentahapan pembangunan dalam RPJPD dijabarkan setiap 5 tahun, sehingga terdapat 4 tahapan pembangunan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :

5.2.1. RPJMD Kesatu (2005-2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD kesatu diarahkan pada dua *core bussines* yang diwujudkan pada Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 dengan rumusan sebagai berikut “*Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009*” dalam Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009. Visi Kabupaten Ciamis tersebut merupakan hasil kristalisasi dari gagasan ideal yang diinginkan dengan bertumpu pada kondisi obyektif dan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis yang dilatarbelakangi :

- a. Kondisi sosial budaya masyarakat Ciamis yang agamis, partisipatif, kebersamaan, santun, kaya akan budaya tradisional serta kesalehan sosial.
- b. Kegiatan perekonomian mayoritas masyarakat bergerak di bidang pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan) serta kegiatan

kepariwisataan yang sampai saat ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Ciamis.

- c. Potensi sumber daya alam yang meliputi sumber daya lahan, sumber daya perairan, sumber daya hutan, iklim, letak geografis sangat mendukung terhadap pengembangan agribisnis dan pariwisata.
- d. Sarana dan prasarana yang telah tersedia meliputi jaringan jalan, pelabuhan udara, dermaga penyeberangan, jaringan irigasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan sangat mendukung dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Ciamis.

Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan lima misi pembangunan sebagai berikut : *Pertama*, menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam agribisnis dan pariwisata; *Kedua*, mengembangkan jiwa kewirausahaan aparatur pemerintah dan masyarakat; *Ketiga*, mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis dan pariwisata; *Keempat*, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan; dan *Kelima*, menyelenggarakan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kelautan secara optimal dan lestari serta menegakkan supremasi hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2009 yang telah tersusun dalam Renstra Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 ditempuh melalui langkah-langkah prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan dari masing-masing misi di atas. Prioritas pembangunan pada RPJMD kesatu dibagi dalam lima bidang pokok, yaitu:

1) Pembangunan Kependudukan, Agama, dan Sosial Budaya

- Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada pengendalian jumlah kelahiran melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu juga pembangunan kependudukan diprioritaskan pada pemberdayaan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin.

Untuk mewujudkan data tunggal dan menjamin kepastian hukum setiap penduduk dilaksanakan melalui pengelolaan sistem administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak penduduk, dan perlindungan sosial.

- Pembangunan agama diprioritaskan pada upaya menciptakan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pembinaan lembaga dan organisasi keagamaan, pembinaan dan pengawasan perkembangan pelaksanaan ibadah sebagai antisipasi tumbuhnya agama atau kepercayaan baru yang menimbulkan keresahan pada masyarakat, serta bantuan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan.

Dengan indikator pembangunan adalah terciptanya harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, interumat dan antarumat beragama, antarumat beragama dengan pemerintah, serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama.

- Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan pendidikan dasar sembilan tahun sebagai sasaran utama pembangunan pendidikan melalui rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perluasan

kesempatan mendapatkan pendidikan dasar yang didukung dengan peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, tenaga pengajar, dan kurikulum.

Untuk memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan dilaksanakan melalui meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan terutama pendidikan dasar sembilan tahun, perluasan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan formal, nonformal, dan luar biasa yang lebih berkualitas yang mempunyai relevansi dengan *life skill*, serta meningkatkan budaya baca masyarakat.

- Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan jumlah kematian ibu dan bayi serta meningkatnya Angka Harapan Hidup yang dilaksanakan melalui pemerataan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit, peningkatan sistem *surveilans*, serta perbaikan gizi masyarakat.

Upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sumber daya kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan manajemen kesehatan yang didukung oleh pengembangan sistem informasi kesehatan serta penguatan sistem perUndang-Undangan, Penelitian dan pengembangan kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan dan upaya pencegahan, peningkatan promosi kesehatan, serta terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.

Untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat melalui upaya penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam pembangunan, terutama dalam berperilaku hidup bersih dan sehat yang ditunjang oleh lingkungan yang sehat yang sasarannya diwujudkan dalam pembinaan Desa Siaga. Indikator keberhasilan pembangunan bidang ini adalah Angka Kematian Ibu (AKI) 27 orang, Angka Kematian Bayi (AKB) 40,35 0/00 Kelahiran Hidup, dan Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 Tahun.

Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2008 ; 25 orang, Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2009 ; 40,22 0/00 Kelahiran Hidup, dan Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009 ; 67,00 Tahun.

- Pembangunan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada pemberdayaan rumah tangga terutama pemberdayaan rumah tangga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemampuan potensi yang dimiliki melalui pengembangan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan daerah diprioritaskan pada peningkatan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas prakarsa dan inovasi dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

- Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada promosi dan pemberdayaan ekonomi penduduk terutama penduduk miskin melalui peningkatan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya, pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial, pelayanan

sosial dasar lainnya, serta menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam dan sosial. Upaya lain yang dilakukan melalui mengembangkan peran perempuan dalam pembangunan serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Dalam mendukung promosi dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dilakukan melalui upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan PMKS lainnya, meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak, lansia, penyandang cacat dan yatim piatu.

- Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada identifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal melalui pengembangan budaya daerah yang mendukung kegiatan pariwisata dan agribisnis sebagai landasan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ciamis, pemanfaatan dan perlindungan terhadap budaya daerah yang berupa modal sosial yang dilaksanakan melalui penguatan kepribadian pemerintah dan masyarakat, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
- Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan diprioritaskan pada pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi olah raga daerah melalui pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan atlet daerah, serta pemberdayaan pemuda pada kegiatan ekonomi sebagai pelopor dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan pekerjaan dan penguatan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja sebagai upaya mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk usia produktif, serta fasilitasi standar kesejahteraan pekerja.

2) Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada peningkatan produksi daerah melalui Penataan komoditi unggulan daerah dan peningkatan iklim investasi : promosi investasi dan penyiapan sarana prasarana pendukung investasi untuk mewujudkan peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkualitas, meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, meningkatkan daya beli, serta meningkatnya jumlah investasi.
Indikator capaian LPE 5 %, PDRB perkapita Rp. 7.400.000,-, dan menurunnya penduduk miskin 1 % per tahun, menurunnya tingkat pengangguran, dan meningkatnya daya beli 2 % per tahun.
Capaian indikator Tahun 2009 ; LPE 4,92%, PDRB perkapita ADH berlaku Rp. 10.075.550,-, persentase penduduk miskin 11,23 %, persentase jumlah pengangguran 5,94 % dan Daya beli Rp. 641.000.
- Pembangunan pertanian diprioritaskan pada pengembangan agribisnis yang diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi melalui penataan kawasan agribisnis, perbaikan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia pertanian, pengembangan usaha bidang pertanian unggulan, perbaikan kondisi lingkungan pertanian, pengembangan pemasaran hasil produksi

dan penerapan teknologi produksi pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) dan kelautan yang dilaksanakan secara terpadu, serta penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan.

Pembangunan pertanian juga diprioritaskan pada penciptaan ketahanan pangan, pembinaan industri hasil hutan, pengembangan perikanan tangkap dan pengembangan kawasan budi daya laut, air payau dan tawar. Upaya tersebut ditandai penataan dan pengembangan produktivitas komoditi unggulan, mengembangkan surplus beras, meningkatnya pangsa pasar industri pertanian, serta meningkatnya optimalisasi penggunaan lahan pertanian.

- Pembangunan pariwisata diprioritaskan pada pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan kepariwisataan melalui penataan obyek wisata unggulan dan penataan sarana dan prasarana akomodasi wisata, pengembangan potensi budaya daerah dan penggalian potensi wilayah lainnya yang didukung dengan sistem informasi dan promosi yang mudah diakses oleh wisatawan.

Indikator pengembangan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya arus kunjungan wisata domestik dan wisatawan mancanegara, lama tinggal wisatawan selama satu hari, serta tumbuhnya akomodasi wisata 10 %.

- Peningkatan keuangan daerah diprioritaskan pada pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efisien melalui pengendalian dan pengawasan penggunaannya. Peningkatan keuangan daerah dilaksanakan melalui meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diindikasikan semakin meningkat dan menguatnya PAD terhadap total pendapatan daerah 22,01 %, serta mampu mendukung kebutuhan belanja daerah yang proporsional, efisien dan efektif.

Capaian Tahun 2009 PAD Kabupaten Ciamis adalah sebesar Rp. 46.561.386.840.

3) Pembangunan Industri dan Perdagangan

- Pembangunan industri di Kabupaten Ciamis diprioritaskan pada penataan kluster industri melalui penataan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha industri, pengembangan produk unggulan industri, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan produk.

Indikator pembangunan industri dan perdagangan yaitu meningkatnya investasi industri 11 %, dan meningkatnya industri yang berkualitas yang didukung sertifikasi (HAKI).

- Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi dan pengembangan prasarana perdagangan, pembinaan pelaku usaha perdagangan serta penyiapan pasar modern untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi diupayakan pada fasilitasi pembinaan manajemen kelembagaan.
- Pengembangan industri dan perdagangan daerah juga diprioritaskan pada penguatan peningkatan promosi dan kerja sama investasi yang dijalankan secara sinergis antar pelaku usaha lokal dan regional melalui pemanfaatan dan pengaturan pasar regional, optimalisasi kelembagaan dan jaringan kemitraan

usaha, penguatan sertifikasi produk daerah, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri menengah dan industri besar.

- 4) Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang
- Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis dan pariwisata daerah, pelayanan mobilitas penduduk, dan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan sarana infrastruktur yang telah ada, serta persiapan pembangunan infrastruktur baru.
Pembangunan infrastruktur transportasi dan peningkatan status dan kualitas jalan melalui pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara.
 - Pembangunan irigasi dan air bersih diprioritaskan pada pengembangan jaringan irigasi, rawa, jaringan pengairan lainnya dengan cakupan layanan irigasi teknis 30 % luas lahan sawah serta pengendalian pembuangan air limbah dan peningkatan saran dan prasarana penyediaan air bersih.
 - Pembangunan ketenagalistrikan diprioritaskan pada pengembangan bidang ketenagalistrikan serta pengembangan sumber energi alternatif. Pembangunan telekomunikasi diprioritaskan pemanfaatan jaringan komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya konservasi, meningkatkan dan mempertahankan fungsi hutan, penyediaan dan pengolahan air baku melalui peningkatan koordinasi antara instansi dan masyarakat pengguna, upaya pembinaan, pengawasan, dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup, peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Pelaksanaan pengelolaan konservasi (sungai, danau dan SDA lainnya) ditandai dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (peningkatan pengendalian polusi lingkungan, pengendalian kebakaran hutan, pencegahan bahaya kebakaran, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian banjir, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dan prakiraan iklim laut).
Dalam rangka mengembangkan potensi kelautan pemberdayaan masyarakat pesisir diprioritaskan pada pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, pembangunan lingkungan hidup diprioritaskan pada pengembangan manajemen bencana melalui peningkatan mitigasi bencana alam, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
 - Penataan ruang diprioritaskan pada pengkajian pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan potensi unggulan daerah melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perencanaan penataan ruang,

pelaksanaan dan pemanfaatan ruang, penegakan peraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, pemetaan kawasan rawan bencana, pengembangan perumahan, lingkungan sehat perumahan, pemberdayaan komunitas permukiman, perbaikan perumahan akibat bencana alam dan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

5) Pembangunan Pemerintahan

- Pembangunan politik diprioritaskan pada pengorganisasian kehidupan politik yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan politik bagi masyarakat dengan mengoptimalkan peran strategis masyarakat melalui kegiatan partisipasi politik yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan sosial dalam konteks global. Sedangkan pembangunan infrastruktur politik diprioritaskan pada pembinaan demokratisasi dalam partai politik khususnya dalam rekrutmen calon anggota badan perwakilan rakyat, dalam bentuk pembinaan sistem rekrutmen yang sehat dan benar dalam partai, sehingga akan diperoleh wakil terbaik untuk mengemban pekerjaan pada badan perwakilan rakyat. Pembinaan juga dilakukan pada organisasi pers, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai peranan penting bagi pemberdayaan badan perwakilan rakyat maupun pemerintah daerah.
- Pembangunan hukum diprioritaskan pada kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi atas produk hukum daerah terhadap peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, penegakkan hukum secara adil, peningkatan kesadaran hukum, dan pembinaan hak asasi manusia melalui pendidikan dan penyuluhan bagi aparatur dan masyarakat agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan HAM, peningkatan pelayanan hukum dan pelayanan publik lainnya, pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum di pengadilan, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayaagunaan sumber daya laut. Pembangunan hukum juga diprioritaskan pada upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
- Pembangunan aparatur diprioritaskan pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang profesional, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan 30 % berpendidikan S1 .
Dengan indikator capaian berupa meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan sumberdaya aparatur.

5.2.2. RPJMD Kedua (2010-2014)

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 adalah “ **Dengan Iman dan Taqwa Ciamis MANTAP Sejahtera Tahun 2014** ”. Pada tahap ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 73,82 pada Tahun 2014.

Pada RPJMD kedua dilakukan upaya penguatan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan penguasaan IPTEKS dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya yang dimiliki. Dalam upaya mewujudkan penguatan perekonomian masyarakat melalui penguatan peningkatan revitalisasi infrastruktur yang ada dan pembangunan infastruktur yang baru, meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat serta menjaga kualitas lingkungan, maka ditetapkan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbagi dalam 5 (lima) bidang pokok, yaitu :

1) Pembangunan Kependudukan, Agama, dan Sosial Budaya

- Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk alamiah melalui peningkatan jumlah akseptor KB mantap, penurunan *Total Fertility Rate* (TFR), pendewasaan usia perkawinan pertama, meningkatkan pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri, promosi dan pembinaan kesehatan reproduksi remaja.
- Untuk mengendalikan laju migrasi dan pemerataan penduduk dilakukan pembangunan melalui perluasan lapangan pekerjaan khususnya di bidang pertanian dan industri kecil nonformal dan pemerataan pembangunan wilayah.
- Meningkatkan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif untuk meningkatkan akurasi data kependudukan.
- Pembangunan bidang agama diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan peran lembaga dan organisasi keagamaan, pembinaan dan pengawasan perkembangan pelaksanaan ibadah sebagai antisipasi tumbuhnya agama atau kepercayaan baru yang menimbulkan keresahan pada masyarakat, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan. Dengan indikator pembangunan terwujudnya kesadaran pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, interumat dan antarumat beragama beragama, antarumat beragama dengan pemerintah serta mengantisipasi munculnya pemahaman ajaran agama yang menyimpang.
- Pembangunan bidang pendidikan diprioritaskan pada pemantapan program pendidikan dasar sembilan tahun sebagai rintisan pendidikan dasar 12 tahun melalui perluasan pelayanan pendidikan dan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan formal, nonformal dan luar biasa yang berkualitas, perluasan pemerataan mutu dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan kecakapan hidup (*life skill*), meningkatkan peranserta masyarakat bidang pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), peningkatan manajemen pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi daerah, dan pengembangan kemitraan dengan pendidikan tinggi di daerah dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam baca, tulis, hitung, penguasaan teknologi, serta kemampuan inovasi yang berbasis pada pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah melalui pemantapan peranan sumber daya

manusia, pengembangan budaya dan minat baca, pengembangan perpustakaan dan pemanfaatan IPTEKS dalam pengembangan potensi daerah.

- Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya pemantapan pencapaian derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan spesifikasi pelayanan kesehatan di 51 Puskesmas dan 1 (satu) RSUD yang ditunjang oleh ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai daya saing global, penguatan manajemen kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan sistem pembiayaan kesehatan terutama jaminan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya jaminan kesehatan rumah tangga miskin, serta strategi pembangunan kesehatan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan dan menciptakan seluruh desa menjadi desa siaga.
- Pembangunan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada menurunkan jumlah rumah tangga miskin melalui pemberdayaan rumah tangga miskin, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan pemuda yang didukung dengan pemberdayaan kelembagaan tingkat desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, pengembangan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan dan ketenagakerjaan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan organisasi perempuan dan pemuda di tingkat kecamatan dan desa.
- Pembangunan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan pada pengembangan pembudayaan, dan penguatan akses bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan jaminan dan pelayanan sosial dasar lainnya yang ditandai: peningkatan kualitas hidup, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
- Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada peningkatan dan pengembangan nilai-nilai kepribadian dan budaya yang berkembang di masyarakat, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, serta peningkatan kerjasama pembinaan dan pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu kekhasan daerah yang menunjukkan jatidiri dan identitas daerah.
- Pembangunan pemuda dan olahraga diprioritaskan pada pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan yang berperan dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan organisasi kepemudaan, atlet daerah, pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
- Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan perkembangan IPTEKS melalui penyediaan lapangan pekerjaan diberbagai sektor kegiatan ekonomi penduduk dan pengembangan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja, serta fasilitasi standar kesejahteraan pekerja.

2) Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan untuk meningkatkan pengembangan produksi daerah melalui Pengembangan komoditi unggulan daerah dan penguatan penataan komoditi unggulan, Pengembangan investasi dan kelompok usaha: promosi investasi dan pengembangan sarana prasarana pendukung investasi, dan pengembangan kelompok ekonomi produktif dan koperasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkualitas, meningkatnya PDRB perkapita, meningkatkan daya beli dan meningkatnya jumlah investasi.
- Pembangunan pertanian diprioritaskan pada penguatan penataan agribisnis yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian melalui penguatan Infrastruktur pendukung, penguatan pengembangan sumber daya manusia agribisnis, penguatan pengembangan usaha bidang pertanian yang didukung oleh pelestarian lingkungan pertanian, pemasaran hasil produksi dan penerapan teknologi produksi pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) dan kelautan yang dilaksanakan secara terpadu, peningkatan ketahanan pangan, pembinaan industri hasil pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan), serta pengembangan perikanan tangkap dan budi daya perikanan. Upaya tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah komoditi unggulan, meningkatnya produksi komoditi unggulan, meningkatnya surplus beras, meningkatnya pangsa pasar lokal, serta meningkatnya optimalisasi intensifikasi pertanian.
- Pembangunan pariwisata diprioritaskan pada manajemen pariwisata yang profesional untuk memantapkan pengembangan potensi ekowisata, agrowisata, wisata budaya dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut, gunung, dan hutan, pengembangan sarana dan prasarana akomodasi kepariwisataan dalam rangka lanjutan *recovery* pasca bencana tsunami, serta peningkatan upaya-upaya pelestarian dan penggalian objek wisata lainnya melalui penataan obyek wisata unggulan, peningkatan infrastruktur, pengembangan obyek wisata baru, serta promosi wisata.
- Pengelolaan keuangan daerah diprioritaskan pada peningkatan pengembangan keuangan daerah melalui penguatan peningkatan PAD dan proporsinya semakin besar terhadap volume APBD. Belanja daerah proporsinya semakin besar untuk kepentingan belanja pembangunan dibanding belanja aparatur.

3) Pembangunan Industri dan Perdagangan

- Pembangunan industri di Kabupaten Ciamis diprioritaskan pada pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan menjadi produk unggulan daerah melalui peningkatan fasilitas dan pembinaan pelaku usaha industri dalam mengembangkan entrepreneurship, penguatan produk unggulan industri yang berkualitas yang memenuhi sertifikasi dan penguatan kelembagaan.
- Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi dan pengembangan prasarana perdagangan, pembinaan pelaku usaha perdagangan serta pengembangan pasar modern untuk mendukung pengembangan produk

unggulan daerah. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi diupayakan pada fasilitasi pembinaan manajemen kelembagaan.

- Dalam rangka mendukung pengembangan industri dan perdagangan dilaksanakan melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan antar daerah dan wilayah, peningkatan promosi investasi serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaku industri kecil.

4) Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada pengembangan penyediaan infrastruktur wilayah yang menunjang pengembangan kawasan agribisnis, usaha dan industri pariwisata, mobilitas penduduk, dan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan sarana infrastruktur yang telah ada serta pembangunan infrastruktur baru.

Peningkatan infrastruktur transportasi wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan pariwisata, melalui peningkatan kualitas/status jalan, berkembangannya jaringan transportasi masal, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara.

- Pembangunan irigasi dan air bersih diprioritaskan pada penguatan pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian pembuangan air limbah dan sanitasi lingkungan.

Pembangunan air bersih diarahkan pada perluasan aksesibilitas terhadap penyediaan air bersih serta rintisan penyediaan sarana/prasarana air minum.

- Pembangunan ketenagalistrikan dan telekomunikasi diprioritaskan pada pemerataan cakupan layanan ketenagalistrikan yang ditandai: keterjangkauan jaringan listrik di 36 kecamatan, pembangunan jaringan listrik 250 km, serta pengembangan energi terbarukan; dan pemerataan cakupan layanan telekomunikasi yang ditandai : pengembangan pemanfaatan fasilitas komunikasi untuk kepentingan publik di perdesaan dan wilayah pesisir serta pemanfaatan telekomunikasi dan informasi untuk pengembangan *e-government* .

- Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tetap diarahkan agar pemanfaatan sumberdaya alam memperhatikan aspek-aspek kelestariannya dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian, baik yang dilakukan perorangan, kelompok, badan hukum dengan menerapkan sistem insentif dan disinsentif yang efektif. Pelaku-pelaku usaha galian/tambang ilegal dapat terbina dengan jaminan melakukan upaya pengelolaan lingkungan secara baik. Hutan negara dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang ditunjukkan dengan perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan kaidah konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan kritis dapat diselesaikan. Gerakan penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan ditingkatkan untuk menambah penutupan lahan bervegetasi tetap. Selanjutnya pemyarakatan sumur resapan air hujan dalam rangka konservasi air digalakan Pada daerah-daerah tertentu dilakukan pembuatan *Check Dam*, Embung, Dam Penahan untuk pengendalian lumpur dan konservasi air.

Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada sungai yang telah mengalami tingkat pencemaran tinggi dan digunakan sebagai bahan baku air minum melalui program kali bersih yang melintasi kota Ciamis. Selain itu, untuk industri yang menghasilkan limbah cair harus dilengkapi dengan IPAL, sistem pelayanan persampahan ditingkatkan, memasyarakatkan pembuatan SPAL bagi rumah tangga.

- Penataan ruang diprioritaskan pada pengembangan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, sehat, dan memerhatikan pada kepentingan publik, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perencanaan penataan ruang, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang, penegakan peraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemetaan kawasan rawan bencana, pengembangan perumahan, lingkungan sehat perumahan, perbaikan perumahan akibat bencana alam, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana.

5) Pembangunan Pemerintahan

- Pembangunan politik dan demokratis diprioritaskan pada pemantapan pengorganisasian kehidupan politik yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan politik serta peningkatan intensitas komunikasi dan budaya politik yang berkembang di masyarakat dengan mengedepankan pada etika politik yang ditandai saling menghargai/menghormati perbedaan pendapat dalam konteks kemajemukan masyarakat.
- Pembangunan hukum diprioritaskan pada penguatan penyelarasan dan pelaksanaan produk hukum yang bersifat pengaturan, penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat dan perlindungan HAM dan peningkatan pelayanan hukum dan pelayanan publik lainnya melalui sosialisasi bidang hukum, peningkatan pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu, serta penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya alam serta pemeliharaan ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
- Pembangunan aparatur diprioritaskan pada pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur melalui rekrutmen yang disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), peningkatan efektivitas pengawasan aparatur daerah serta koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur, peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab.
- Pembangunan pemerintahan desa/kelurahan diprioritaskan pada pemberdayaan aparatur desa/kelurahan, pengembangan otonomi desa dalam mengembangkan swadaya masyarakat melalui pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pemberian bantuan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara proporsional dan kompetitif, identifikasi desa/kelurahan berdasarkan potensi yang dimiliki, identifikasi desa pertumbuhan, desa transisi, dan desa tertinggal.

5.2.3. RPJMD Ketiga (2014-2019)

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD kesatu dan kedua dan seiring dengan momentum pemekaran wilayah maka RPJMD ketiga diarahkan untuk pemantapan kemandirian melalui pengembangan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya menuju pada kemandirian dan pencapaian daya saing yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, ketersediaan infrastruktur yang baik, serta pengelolaan lingkungan, dengan fokus pada pembangunan perdesaan

Sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran, yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Ciamis melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, maka sasaran pokok dan arah kebijakan pada RPJMD Ketiga (2014-2019) ini dilakukan penyesuaian. Sasaran pokok, indikator kinerja dan kebijakan prioritas periode Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Matrik 5.3
Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Kebijakan Prioritas
Periode Tahun 2014-2019

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan ahlak mulia masyarakat.	1 Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	1 Pengembangan dan pemantapan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan
		2 Meningkatkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta berbudi luhur	2 Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional, berpengetahuan, berbudaya dan berwawasan, mampu menerapkan IPTEKS terutama yang bersifat terapan serta mampu mengembangkan seni, olahraga, kreativitas dan inovasi.	1 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan, dan minat baca	1 Peningkatan peranserta masyarakat di bidang pendidikan
			2 Penuntasan program pendidikan usia dini
			3 Pengembangan akses masyarakat terhadap perpustakaan
		2 Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan kualitas baik sebanyak 80%.	4 Peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan
			5 Peningkatan manajemen pelayanan sarana dan prasarana pendidikan
3 Meningkatkan jumlah rata-rata lamanya penduduk bersekolah hingga mencapai lebih dari 8 tahun	6 Penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun dan penguatan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun		
4 Meningkatkan mutu kelulusan siswa di tingkat	7 Optimalisasi pelayanan pendidikan		

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
		SD, SMP dan SMA hingga mencapai 100%	
		5 Meningkatnya peran lembaga pendidikan tinggi	8 Peningkatan peran lembaga pendidikan tinggi
		6 Meningkatnya pemerataan mutu, relevansi pendidikan umum dan <i>life skill</i>	9 Pengembangan dan penguatan pendidikan kejuruan
		7 Terpeliharanya nilai-nilai seni dan budaya	10 Pengembangan dan penguatan nilai-nilai seni dan budaya daerah
		8 Meningkatnya prestasi olahraga	11 Pembinaan profesionalisme atlet daerah
3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, pengembangan sarana dan prasarana yang bermutu sehingga tercipta masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.	1 Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan kualitas baik sebesar 80%	1 Penguatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
		2 Peningkatan AHH hingga mencapai angka di atas 68 tahun	2 Penguatan sistem pembiayaan kesehatan khususnya masyarakat miskin.
		3 Penurunan AKB hingga mencapai target sesuai dengan <i>new MDGs</i>	3 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang kesehatan
		4 Penurunan AKI hingga mencapai target sesuai dengan <i>new MDGs</i>	4 Peningkatan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan swasta di bidang kesehatan
		5 Penurunan prevalensi Gizi Buruk hingga mencapai angka dibawah 5 %	5 Penguatan sistem pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		6 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	6 Peningkatan pelayan KB sesuai standar
4	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan kemandirian, keuletan dan kemitraan	1 Meningkatnya Sebaran Jumlah Sarana Sosial di tiap Kecamatan	1 Penguatan aksesibilitas bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya
		2 Jumlah Penduduk Miskin dibawah 7%	2 Peningkatan upaya program penang-gulangan kemiskinan secara terpadu
		3 Menurunnya persentase Rumah Tidak Layak Huni menjadi kurang dari 35%	3 Peningkatan permukiman layak huni
		4 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	4 Penguatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan pemuda dan perempuan
			5 Penanganan korban tindak

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
			kekerasan terhadap perempuan dan anak
5	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, diwujudkan dengan sosok dan perilaku aparatur yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.	1 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 15% dibandingkan tahun 2014	1 Penguatan kualitas, kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur
		2 Ketersediaan <i>Website</i> di setiap OPD	2 Optimalisasi data dan informasi pembangunan daerah
		3 Persentase lelang kegiatan melalui LPSE diatas 35%	3 Optimalisasi peran ULP
6	Terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah, yang didukung oleh semakin besar peran pendapatan daerah, semakin efektif dan efisien belanja daerah untuk pembangunan, serta pengelolaan keuangan dan asset daerah secara profesional yang sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.	1 Kualitas Pengelolaan Keuangan yang dibuktikan dengan pencapaian WTP	1 Peningkatan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah
		2 Persentase jumlah PAD terhadap APBD diatas 7%	2 Peningkatan pemanfaatan, penggunaan dan penatausahaan asset daerah
			3 Peningkatan PAD
7	Terwujudnya manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil bagi seluruh masyarakat.	1 Lama Proses Perijinan tidak melebihi 1 minggu	1 Peningkatan dan penerapan SPM
		2 Ketersediaan sistem informasi manajemen pelayanan publik di masing-masing SKPD terkait	2 Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur daerah
			3 Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja
			4 Pengembangan kerjasama kemitraan Pemda dan desa dengan pihak ketiga
			5 Peningkatan layanan administrasi
8	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan HAM, menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang	Penurunan angka pelanggaran terhadap Perda tidak lebih dari 30%	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
			2 Peningkatan penegakkan hukum dan HAM
			3 Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan.
			4 Peningkatan kesadaran dan

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
	didukung oleh produk hukum daerah		<p>penegakan hukum masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>5 Peningkatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>
9	Tertata, terpelihara dan terlindunginya ketersediaan sumber daya alam yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	<p>Persentase jumlah kerusakan hutan kurang dari 10%</p> <p>2 Persentase Perusahaan yang mempunyai dokumen Amdal dan IPAL meningkat sebesar 25%</p>	<p>1 Intensifikasi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan SDA</p> <p>2 Optimalisasi fungsi kawasan lindung</p> <p>3 Gerakan penghijauan lingkungan</p> <p>4 Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau</p> <p>5 Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>7 Optimalisasi pengembangan pemanfaatan ruang</p>
10	Tergali, terkelola dan termanfaatkannya SDA secara optimal melalui pengelolaan lingkungan yang serasi, seimbang dan lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi guna membangun struktur perekonomian yang tangguh, prasarana dasar permukiman dan memiliki keunggulan kompetitif, melalui pendekatan keseimbangan SDA dan pelestarian LH	<p>1 Meningkatnya Izin penambangan dan penggalian yang memiliki analisis dampak lingkungan sebesar 30%</p> <p>2 Meningkatnya reklamasi lahan pertambangan dan penggalian sebesar 5 % per tahun</p>	<p>1 Perintisan pengembangan sumberdaya alternative dan perintisan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan</p> <p>2 Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestariannya serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>3 Peningkatan permukiman sehat</p> <p>4 Peningkatan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam</p> <p>5 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>6 Pengembangan usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan</p> <p>7 Peningkatan ekonomi</p>

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
			masyarakat sekitar hutan
11	Terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya produksi yang menguntungkan pelaku usaha, produksi yang tinggi baik kuantitas maupun kualitas, perubahan bahan baku menjadi barang hasil olahan, arus barang ke luar pasar lokal yang tinggi diikuti dengan semakin berkurangnya arus barang sejenis masuk ke pasar lokal.	1 Pertumbuhan ekonomi daerah di atas 5% per tahun	1 Peningkatan kualitas produksi, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
			2 Penerapan teknologi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta mekanisasinya secara terpadu
			3 Penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan.
		2 Tingkat pengangguran terbuka di bawah 5%	4 Penguatan kemampuan kualitas dan kuantitas SDM agribisnis
		3 Meningkatnya arus bongkar muat orang, dan barang per tahun sebesar 6%	5 Penguatan jaringan transportasi yang menunjang peningkatan akses terhadap simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dan pengembangan wilayah
12	Terbangunnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis pada bisnis unggulan (<i>core bussiness</i>) yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, serta pertambangan dan energi sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan sektor lainnya yang menghasilkan produk yang terpasarkan (<i>marketable</i>) dan berkelanjutan.	1 Penentuan sektor dan komoditas unggulan Kabupaten Ciamis per 5 tahun	1 Pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional
			2 Pemantapan penataan agribisnis
		2 Peningkatan jumlah unit usaha manufaktur sektor dan komoditas unggulan	3 Peningkatan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam
		3 Persentase peningkatan ekspor sektor dan komoditas unggulan sebesar 5% per tahun	4 Penguatan peningkatan industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan
13	Tercapainya pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan daya beli masyarakat yang tinggi.	1 Pertumbuhan ekonomi di atas 5%	1 Pengembangan manajemen pariwisata yang terintegrasi
			2 Peningkatan pengembangan ekowisata, agrowisata dan wisata budaya yang berwawasan lingkungan
		2 Pendapatan perkapita masyarakat mencapai angka diatas Rp. 15 juta per	3 Pembinaan industri hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
		tahun	kehutanan.
		3 Indeks Daya Beli mencapai angka di atas 68	4 Revitalisasi koperasi 5 Penguatan peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan untuk mendukung penguatan produksi unggulan
14	Meningkatnya investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kesempatan berusaha.	1 Peningkatan kesempatan kerja di atas 94%	1 Peningkatan aksesibilitas lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja 2 Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang representative
		2 Peningkatan Investasi berskala menengah dan Besar sebesar 3% terhadap PDRB	3 Peningkatan kemitraan dan kebijakan investasi daerah 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung investasi
		3 Peningkatan unit usaha UMKM sebesar 3% per tahun	5 Penguatan daya saing kelompok ekonomi produktif 6 Penguatan peningkatan industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan 7 Pembentukan BUMD hasil potensi unggulan daerah
15	Tersedianya produk pangan yang cukup, bermutu, aman, serta memiliki nilai ekonomi yang kompetitif.	1 Ketersediaan pangan utama mencapai angka 65%	1 Penerapan keanekaragaman pangan dan pola tanam terpadu 2 Penerapan teknologi produksi pertanian dan mekanisasi pertanian secara terpadu
		2 Angka inflasi pangan tidak melebihi angka 7%	3 Efektivitas dan pengendalian lahan pertanian
16	Terbangunnya komitmen, kerjasama dengan pelaku usaha/ investor dalam rangka memberdayakan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.	Pertumbuhan Pembinaan UMKM sebesar 5% per tahun	1 Peningkatan kemitraan UMKM 2 Peningkatan kerjasama kepariwisataan
17	Terbangunnya jaringan informasi sebagai pusat pengembangan informasi potensi Kabupaten Ciamis.	Terbangunnya sistem informasi penanaman modal daerah	1 Optimalisasi data dan informasi pembangunan daerah 2 Peningkatan efektivitas promosi dan data potensi unggulan daerah.
18	Terbangunnya jaringan	Proporsi jalan baik sebesar	1 Peningkatan kualitas jalan

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
	transportasi, irigasi dan infrastruktur wilayah lainnya yang representatif sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat	60%	2 Penguatan jaringan transportasi yang menunjang peningkatan akses terhadap simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dan pengembangan wilayah
			3 Penguatan penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya
			4 penguatan upaya perluasan dan pemerataan layanan ketenagalistrikan dan pengembangan energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan
			5 Penguatan upaya perluasan dan pemerataan layanan telekomunikasi sampai ke perdesaan
			6 Penguatan penyediaan air minum dalam rangka memperluas cakupan layanan bagi masyarakat

5.2.4. RPJMD Keempat (2019-2024)

Berlandaskan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD kesatu, kedua dan ketiga, maka RPJMD keempat diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan melalui penciptaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan kemandirian dan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki daya saing, infrastruktur yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Prioritas pembangunan pada tahap ini sebagian besar merupakan kelanjutan pembangunan pada tahap sebelumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Matrik 5.4
Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Kebijakan Prioritas
Periode Tahun 2019-2024

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kebijakan Prioritas
1	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan	1 Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran	1 Pemantapan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kebijakan Prioritas
	pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan ahlak mulia masyarakat.	agama dalam kehidupan bermasyarakat	
		2 Meningkatnya Masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur	2 peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional, berpengetahuan, berbudaya dan berwawasan, mampu menerapkan IPTEKS terutama yang bersifat terapan serta mampu mengembangkan seni, olahraga, kreativitas dan inovasi.	1 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan, dan minat baca	1 Penguatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan 2 Penguatan pengembangan akses masyarakat terhadap perpustakaan
		2 Terpenuhiya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan kualitas baik	3 Penguatan pengembangan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan 4 Penguatan manajemen pelayanan sarana dan prasarana pendidikan
		3 Meningkatnya jumlah rata-rata lamanya penduduk bersekolah hingga mencapai lebih dari 8 tahun	5 Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun
		4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa di tingkat SD, SMP dan SMA hingga mencapai 100%	6 Pemantapan pelayanan pendidikan
		5 Meningkatnya peran lembaga pendidikan tinggi	7 Penguatan peran lembaga pendidikan tinggi
		6 Meningkatnya pemerataan mutu, relevansi pendidikan umum dan <i>life skill</i>	8 Penguatan pendidikan kejuruan
		7 Terpeliharanya nilai-nilai seni dan budaya	9 Penguatan nilai-nilai seni dan budaya daerah
		8 Meningkatnya prestasi olahraga	10 Pengembangan pembinaan profesionalisme atlet daerah
3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, pengembangan sarana dan prasarana yang bermutu sehingga tercipta masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.	1 Terpenuhiya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan kualitas baik	1 Pemantapan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
		2 Peningkatan AHH hingga mencapai angka di atas 70 tahun	2 Penguatan dan pemantapan sistem pembiayaan kesehatan khususnya masyarakat miskin.
		3 Penurunan AKB hingga mencapai target sesuai dengan new MDGs	3 Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang kesehatan

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kebijakan Prioritas
		4 Penurunan AKI hingga mencapai target sesuai dengan new MDGs	4 Pemantapan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan swasta di bidang kesehatan
		5 Penurunan prevalensi Gizi Buruk hingga mencapai angka dibawah 5 %	5 Pemantapan sistem pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		6 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	6 Pemantapan pelayanan KB sesuai standar
4	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan kemandirian, keuletan dan kemitraan	1 Meningkatnya Sebaran Jumlah Sarana Sosial di tiap Kecamatan	1 Peningkatan penguatan aksesibilitas bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya
		2 Jumlah Penduduk Miskin dibawah 5%	2 Penguatan upaya program penanggulangan kemiskinan secara terpadu
		3 Menurunnya persentase Rumah Tidak Layak Huni menjadi kurang dari 25%	3 Pengembangan permukiman layak huni
		4 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	4 Pemantapan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan pemuda dan perempuan
			5 Peningkatan Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
5	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, diwujudkan dengan sosok dan perilaku aparatur yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.	1 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 20% dibandingkan tahun 2019	1 Pemantapan kualitas, kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur
		2 Ketersediaan Website di setiap OPD	2 Penguatan data dan informasi pembangunan daerah
		3 Persentase lelang kegiatan melalui LPSE diatas 50%	3 Penguatan peran ULP
6	Terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah, yang didukung oleh semakin besar peran pendapatan daerah, semakin efektif dan efisien belanja daerah untuk pembangunan serta pengelolaan keuangan dan	1 Kualitas Pengelolaan Keuangan yang dibuktikan dengan pencapaian WTP	1 Penguatan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah
		2 Persentase jumlah PAD terhadap APBD diatas 10%	2 Peningkatan pemanfaatan, penggunaan dan penatausahaan asset daerah
			3 Penguatan PAD

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kebijakan Prioritas
	asset daerah secara profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
7	Terwujudnya manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil bagi seluruh masyarakat.	<p>1 Lama Proses Perijinan tidak melebihi 1 minggu</p> <p>2 Meningkatnya peran sistem informasi manajemen pelayanan publik di masing-masing SKPD terkait</p>	<p>1 Optimalisasi penerapan SPM</p> <p>2 Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur daerah</p> <p>3 Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja</p> <p>4 Penguatan kerjasama kemitraan pemerintah daerah dan desa dengan pihak ketiga</p> <p>5 Optimalisasi layanan administrasi</p>
8	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh produk hukum daerah	Penurunan angka pelanggaran terhadap Perda tidak lebih dari 20%	<p>1 Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi</p> <p>2 Optimalisasi penegakan hukum dan HAM</p> <p>3 Pemantapan pendidikan wawasan kebangsaan.</p> <p>4 Pemantapan kesadaran dan penegakan hukum masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>5 Pemantapan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>
9	Tertata, terpelihara dan terlindunginya ketersediaan sumber daya alam yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	<p>1 Persentase jumlah kerusakan hutan kurang dari 5%</p> <p>2 Persentase Perusahaan yang mempunyai dokumen Amdal dan IPAL</p>	<p>1 Peningkatan intensifikasi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan SDA</p> <p>2 Optimalisasi fungsi kawasan lindung</p> <p>3 Optimalisasi Gerakan penghijauan lingkungan</p> <p>4 Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau</p> <p>5 Optimalisasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan</p>

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kebijakan Prioritas
		meningkat sebesar 50%	<p>pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>7 Optimalisasi pengembangan pemanfaatan ruang</p>
10	Tergali, terkelola dan termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal melalui pengelolaan lingkungan yang serasi, seimbang dan lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi guna membangun struktur perekonomian yang tangguh, prasarana dasar permukiman dan memiliki keunggulan kompetitif, melalui pendekatan keseimbangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	<p>1 Meningkatnya Izin penambangan dan penggalian yang memiliki analisis dampak lingkungan sebesar 40%</p> <p>2 Meningkatnya reklamasi lahan pertambangan dan penggalian sebesar 5 % per tahun</p>	<p>1 Pengembangan sumber daya alternative dan perintisan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan</p> <p>2 Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestariannya serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>3 Peningkatan permukiman sehat</p> <p>4 Optimalisasi diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam</p> <p>5 Optimalisasi kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>6 Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan</p> <p>7 Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan</p>
11	Terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya produksi yang menguntungkan pelaku usaha, produksi yang tinggi baik kuantitas maupun kualitas, perubahan bahan baku menjadi barang hasil olahan, arus barang ke luar pasar lokal yang tinggi diikuti dengan semakin berkurangnya arus barang sejenis masuk ke pasar lokal.	<p>1 Pertumbuhan ekonomi daerah di atas 6% per tahun</p> <p>2 Tingkat pengangguran terbuka di bawah 4%</p> <p>3 Meningkatnya arus bongkar muat orang, dan</p>	<p>1 Peningkatan kualitas produksi, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.</p> <p>2 Penerapan teknologi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta mekanisasinya secara terpadu</p> <p>3 Penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan.</p> <p>4 Penguatan kemampuan kualitas dan kuantitas SDM agribisnis</p> <p>5 Penguatan jaringan transportasi yang</p>

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kebijakan Prioritas
		barang per tahun sebesar 6%	menunjang peningkatan akses terhadap simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dan pengembangan wilayah
12	Terbangunnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis pada bisnis unggulan (<i>core bussiness</i>) yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, serta pertambangan dan energi sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan sektor lainnya yang menghasilkan produk yang terpasarkan (<i>marketable</i>) dan berkelanjutan.	1 Penentuan sektor dan komoditas unggulan Kabupaten Ciamis per 5 tahun	1 Pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional
		2 Peningkatan jumlah unit usaha manufaktur sektor dan komoditas unggulan	2 Pemantapan penataan agribisnis
		3 Persentase peningkatan ekspor sektor dan komoditas unggulan sebesar 5% per tahun	3 Peningkatan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam
13	Tercapainya pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan daya beli masyarakat yang tinggi.	1 Pertumbuhan ekonomi di atas 6%	4 Penguatan peningkatan industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan
		2 Pendapatan perkapita masyarakat mencapai angka diatas Rp. 17 juta per tahun	1 Pengembangan manajemen pariwisata yang teritegrasi
		3 Indeks Daya Beli mencapai angka di atas 70	2 Peningkatan pengembangan ekowisata, agrowisata dan wisata budaya yang berwawasan lingkungan
14	Meningkatnya investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kesempatan berusaha.	1 Peningkatan kesempatan kerja di atas 96%	3 Optimalisasi pembinaan industri hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
		2 Peningkatan Investasi berskala menengah dan Besar sebesar 5% terhadap PDRB	4 Revitalisasi koperasi
		3 Peningkatan unit usaha	5 Penguatan peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan untuk mendukung penguatan produksi unggulan
			1 Peningkatan aksesibilitas lembaga-lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja
			2 Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang representatif
			3 Pengembangan kemitraan dan kebijakan investasi daerah
			4 Penguatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung investasi
			5 Pemantapan daya saing



BAB VI

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam :

- a. Penyusunan Visi, Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ciamis;
- c. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten, provinsi dan nasional;
- d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ciamis dengan didukung oleh Instansi Vertikal, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ciamis berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan;
5. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan.



BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan tahapan pembangunan berdasarkan pendekatan strategis. Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dilakukan seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Ciamis. Sasaran pokok, target kinerja dan arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Ciamis dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksana dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Perubahan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 10 Tahun ke depan, terhitung sejak Periode RPJMD Tahap III, yaitu Tahun 2014-2019. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi seluruh kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ciamis, termasuk bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritasnya.

Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini perlu didukung oleh komitmen penyelenggara pemerintahan daerah, para pemangku kepentingan, dunia usaha dan seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis.

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN